

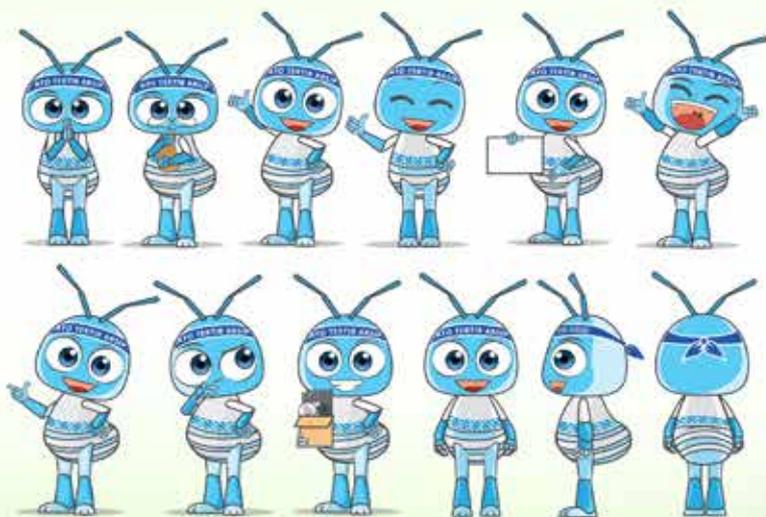
ARSIP

Media Kearsipan Nasional

ARSIP UNTUK MASYARAKAT



Hai Sahabat Arsip...
Aku maskot "Tertib Arsip"
Aku yang akan mengingatkan
sahabat arsip untuk mengelola
dan menjaga arsip dengan
baik....



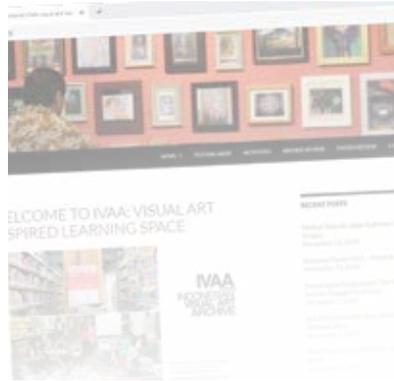
DAFTAR ISI



5 MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU MELALUI INOVASI BIDANG KEARSIPAN UNTUK MASYARAKAT

Dalam konteks penyelenggaraan kearsipan, arsip memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip sebagai informasi dan peristiwa yang terekam mengenai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sumber informasi yang objektif menyangkut berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

| | |
|--|-----------|
| DARI REDAKSI | 4 |
| ARTIKEL LAPORAN UTAMA | 15 |
| PEMBINA KEARSIPAN YANG KOMUNIKATIF | 17 |
| KHAZANAH | 20 |
| MENGULIK ARSIP KONTRAK TERNATE NO. 231 “CONTRACT TUSSCHEN HET ENGELSCHGOVERNEMENT EN DEN KONING VAN TERNATEN” MELALUI TRANSLITERASI ARSIP | 23 |
| KHAZANAH | 27 |
| PAHITNYA KOPI ERA VOC MANCANEGARA | 23 |
| MENGENAL LEBIH DEKAT SERVICE DES ARCHIVES DE NOUVELLE CALEDONIE | 27 |
| DAERAH | 27 |
| KIPRAH DISPUSIPDA JAWA BARAT TINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI DAERAH | 27 |



10 ARSIP KOMUNITAS : KEGEMBIRAAN AKAR RUMPUT MENG-ARSIP-KAN DIRINYA

Arsip Komunitas (*Community Archives*) (untuk selanjutnya disebut AK) lahir karena arsip yang terkumpul pada lembaga-lembaga kearsipan arus utama terlalu fokus pada arsip formal (lahir dari organisasi formal) yang didalamnya kurang merepresentasikan suara kalangan non-elit, akar rumput dan pihak yang terpinggirkan (Flinn, 2007). Ketika arsip formal ini mendominasi sebagai bahan dalam membangun ingatan-kolektif, tak ayal banyak suara yang tak tersuarakan.

| | |
|--|-----------|
| TEKNOLOGI | 31 |
| PEMANFAATAN CLOUD COMPUTING BERBASIS CLOUD STORAGE SEBAGAI BACK UP PENYIMPANAN ARSIP KELUARGA | 31 |
| VARIA | 34 |
| PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN SIKN DAN JIKN | 34 |
| HUKUM | 36 |
| PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN | 36 |
| CERITA KITA | 39 |
| IBU GURU ROKAYAH | 39 |
| LIPUTAN | 41 |

Keterkaitan Antar-Paradigma



12 BERKOMUNITAS PENGARSIPAN

Semangat berkomunitas pengarsipan ini serupa *crowd-sourcing* dan *citizen journalism*. Dus, kalangan praktisi dan teoretisi kearsipan mengemukakan gagasan *archiving me* atau *citizen archiving*. Dewasa ini, istilah serupa mengemuka, seperti *participatory archives* dan *community archives*.



Cover Designer : Isanto

KETERANGAN COVER

Pameran Arsip Nusantara "Merajut Keberagaman Menuju Indonesia Maju" di Museum Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 24-31 Agustus 2019
Sumber Foto : Dokumentasi Humas ANRI

Pembina:

Kepala ANRI,
Sekretaris Utama,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi dan
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab:

M. Imam Mulyantono

Pemimpin Redaksi:

Gurandhyka

Wakil Pemimpin Redaksi:

Aria Maulana

Dewan Redaksi:

Azmi, Hilman Rosmana,
M. Ihwan,
Bambang Parjono Widodo,

Redaktur Pelaksana:

Bambang Barlian,
Susanti,

Mudanto Pamungkas

Editor:

Dhani Sugiharto,
Rayi Darmagara,
R. Suryagung Sudibyo P,
Intan Lidwina,
Erieka Nurlidya,
Yuanita Utami,

Fotografer:

Muhamad Dullah
Lukman Nul Hakim

Desain Grafis:

Beny Oktavianto
Isanto

Sekretariat:

Krestiana Evelyn,
Vinta Aulia,
Putri Iswayanti

.....
Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Bagian Humas dan TU Pimpinan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: humas@anri.go.id



Rapat Tim Redaksi

Arsip memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip sebagai informasi dan peristiwa yang terekam mengenai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sumber informasi yang objektif menyangkut berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Arsip sebagai sumber informasi dan pengetahuan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat. Selain sebagai sumber informasi, arsip juga merupakan sebagai bukti kepemilikan aset bagi masyarakat.

Pada tema kali ini majalah ARSIP mengangkat tema Arsip untuk Masyarakat. Tema yang mengulas mengenai peran arsip untuk masyarakat serta peran lembaga kearsipan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan. Kami sajikan pula Rubrik Khazanah, Rubrik Daerah, Rubrik Mancanegara, Rubrik Hukum, Rubrik Varia, Rubrik Cerita Kita dan Rubrik Liputan mengenai berita-berita kearsipan menjadi pelengkap pada edisi kali ini.

Akhirnya, semoga sajian informasi edisi kali ini, dapat memberikan manfaat bagi Sahabat Arsip. Sekiranya terdapat berbagai kekurangan, kami sangat berharap memperoleh saran dan kritik untuk perbaikan edisi selanjutnya.

Salam Redaksi



MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU MELALUI INOVASI BIDANG KEARSIPAN UNTUK MASYARAKAT

Joko Widodo bersama Maruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 dalam sidang Paripurna MPR RI yang digelar pada Minggu, 20 Oktober 2019. Setelah pengambilan sumpah pelantikan, Presiden Jokowi membacakan pidato pertamanya untuk masa jabatan kedua ini. Ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam pidato tersebut diantaranya mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) dan inovasi.

Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang sangat kompetitif, masyarakat harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harus terus berinovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato pertamanya setelah

dilantik menjadi Presiden periode 2019-2024.

“Ini cerita sedikit. Lima tahun yang lalu, tahun pertama saya di istana, saya mengundang pejabat dan masyarakat untuk halal-bihalal. Protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu, saya ikut. Tahun pertama, saya ikut. Tahun kedua, ada halal-bihalal lagi. Protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Langsung saya bisik-bisik, saya bilang ke Mensesneg, “Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, ini akan menjadi kebiasaan, di titik itu lagi. Dan itu akan dianggap sebagai aturan. Dan kalau diteruskan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang.” Duduknya apa, berdirinya di situ terus. Ini yang namanya monoton dan rutinitas”, tutur Presiden Jokowi. Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal dan meningkatkan

produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja berorientasi pada proses, tapi harus berorientasi pada hasil yang nyata.

Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada jajarannya untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. “Saya sering mengingatkan kepada para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati pembangunan. Sering kali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya “Programnya sudah terlaksana, Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum



Dokumentasi Humas ANRI

Joko Widodo bersama Maruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 dalam sidang Paripurna MPR RI yang digelar pada Minggu, 20 Oktober 2019. Setelah pengambilan sumpah pelantikan, Presiden Jokowi membacakan pidato pertamanya untuk masa jabatan kedua ini.

menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya. Yang utama itu adalah hasilnya. Dan cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Di situ ada *sent*, artinya telah terkirim. Ada *delivered*, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin *delivered*, bukan hanya menjamin *sent*. Dan saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya *sending-sending* saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah *making delivered*. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat”, tegasnya.

Dalam konteks penyelenggaraan kearsipan, arsip memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip sebagai informasi dan peristiwa yang terekam mengenai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan

sumber informasi yang objektif menyangkut berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Arsip dengan segala bentuk medianya merupakan memori kolektif yang dapat meningkatkan kesadaran nasional, mempertegas identitas dan jatidiri bangsa Indonesia. Melalui arsip, dapat dipelajari sejarah mengenai kegagalan yang pernah dialami dan prestasi yang pernah diraih bangsa, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memajukan bangsa ke depan. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menguraikan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran informasi yang tersedia.

Negara wajib memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi mengingat hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Lembaga kearsipan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki fungsi mengelola informasi berkewajiban mengelola khazanah arsip statis yang diterima dari pencipta arsip untuk kepentingan publik secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.

Pengelolaan arsip statis oleh lembaga kearsipan dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan fungsi pengelolaan arsip statis Pasal

64 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur bahwa lembaga kearsipan wajib menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip. Akses arsip statis pada lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah yuridiksinya dilaksanakan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Akses arsip statis pada lembaga kearsipan didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga kearsipan daerah provinsi, lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan arsip statis kepada pengguna arsip di lingkungannya berdasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pelayanan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses publik terhadap arsip statis.

Arsip sebagai sumber informasi dan pengetahuan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat. Hal ini sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Taufik. "Artinya informasi yang ada di kearsipan bukan untuk dikubur. Dia harus dihidupkan kembali dan disajikan ke masyarakat membantu mencerdaskan anak bangsa. Mengubah pola pikir ini penting agar menjadi masyarakat yang archive minded atau ketergantungan membutuhkan informasi dari arsip seperti negara-negara maju dan butuh



Plt. Kepala ANRI, M. Taufik

terus-menerus," tutur M. Taufik.

Lebih lanjut M. Taufik mengimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan arsip untuk kemaslahatan bersama. "Di dalam arsip yang menyimpan informasi itu akan dibutuhkan oleh pelajar, peneliti, sejarawan atau penulis dan sebagainya. Semua elemen masyarakat boleh menggunakannya. Lembaga ini pun ada eksistensinya, ada kebermanfaatannya bagi masyarakat," tambah dia.

Menyikapi perkembangan zaman, ANRI terus berupaya memberikan kemudahan akses arsip kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang dapat diakses melalui www.jikn.go.id.

"Kaitannya dengan konfigurasi data secara nasional diakses masyarakat melalui internet bisa diakses dari manapun. Progresnya hampir separuh program dilakukan dan ke depan akan dilengkapi," jelas

Taufik. "Semua ini amanah UU Kearsipan pada lembaga ini. Semua butuh informasi realtime. Semua ini mengarah ke sana," tambahnya. Semua arsip yang ada di www.jikn.go.id dapat diakses dari seluruh Indonesia atau di manapun jika terhubung dengan internet.

Selain www.jikn.go.id, untuk memudahkan akses arsip mengenai sejarah perjalanan bangsa Indonesia, masyarakat juga dapat mengakses <https://sejarah-nusantara.anri.go.id/id/>. Website ini memberikan akses atau jalan masuk ke ribuan arsip yang belum pernah diteliti terkait sejarah Nusantara serta hubungannya dengan dunia luas selama abad ketujuh belas dan kedelapan belas. Website ini juga menghantar kepada sejumlah buku terbitan lama milik Arsip Negara di masa lampau (*Landsarchief*), mulai dari Catatan Harian Kastel Batavia yang telah diterbitkan (1624-1682). Melalui website <https://sejarah-nusantara.anri.go.id/id/> diharapkan para ilmuwan, peneliti, mahasiswa dan masyarakat umum dapat memanfaatkan website tersebut secara maksimal dalam penelitiannya tentang peran masa lalu dan masa kini Indonesia dalam kancah Sejarah Dunia.

ANRI juga memanfaatkan media sosial untuk "mendekatkan" arsip di kalangan milenial. Dengan menggunakan *channel* media sosial seperti *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, ANRI secara rutin mengunggah arsip-arsip bernilai guna sejarah. Hal ini bertujuan agar masyarakat, khususnya kaum milenial mendapatkan informasi seputar sejarah Indonesia di masa lampau.

Sementara itu, Perkembangan teknologi informasi, memunculkan paradigma baru dalam pengelolaan

LAPORAN UTAMA

dan pemanfaatan arsip. Agar arsip konvensional dapat bertahan lama sehingga informasinya masih dapat diakses oleh masyarakat, dilakukan proses alih media arsip. Di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, guna menyelamatkan arsip masyarakatnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta membuka layanan alih media dari arsip berbentuk kertas ke media penyimpanan arsip digital.

“Kami baru melakukan sosialisasi di beberapa kelurahan saja sehingga warga yang memanfaatkan layanan itu baru berasal dari kelurahan yang sudah disosialisasi. Namun, kami berharap layanan ini bisa menjangkau semua warga,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Wahyu Hendratmoko di Yogyakarta (<https://www.beritasatu.com/nasional/451768/warga-yogyakarta-mulai-manfaatkan-layanan-alih-media-arsip>).

Layanan alih media penyimpanan arsip yang dapat diakses secara gratis oleh warga Kota Yogyakarta adalah Amarta atau Arsip Terjaga Milik Keluarga Kita. Masyarakat dapat melakukan alih media penyimpanan berbagai arsip penting milik mereka mulai dari kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), sertifikat tanah, atau arsip penting lainnya. “Tinggal datang ke Kantor Arsip Kota Yogyakarta di Jalan Letjen Suprpto. Petugas akan melakukan pemindaian berbagai arsip tersebut dan menyimpannya ke cakram padat,” kata Wahyu. Penyimpanan arsip dalam bentuk digital tersebut, lanjut Wahyu akan memudahkan masyarakat dan keamanan arsip akan lebih terjaga.

Selain Amarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta juga memiliki layanan

ANRI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LARASKA

LAYANAN RESTORASI ARSIP KELUARGA

Memberikan layanan **GRATIS** kepada masyarakat untuk merestorasi/perbaiki fisik arsip keluarga yang dimiliki contoh:

- Akte Perkawinan
- Akte Kelahiran
- Kartu Keluarga
- KTP
- Sertifikat tanah
- Ijazah
- Dll.

Syarat:

- Arsip keluarga dibawa langsung oleh pemiliknya ke ANRI setiap hari kerja jam 08.00 - 15.00 WIB
- Arsip asli (tidak dalam bentuk foto copy/laminating)
- Tiap-liap ke uarga maksimal 10 lembar
- Bisa ditunggu

GRATIS

INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI:

BAGIAN HUMAS
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jalan Ampera Raya nomor 7 Cilandak Jakarta 12560
tlp. 021 - 7805851 ext. 111, 221 dan 404
<http://www.anri.go.id> - anriinfo@anri.go.id

Publikasi Layanan Restorasi Arsip Keluarga

Arsita atau *Archive Recovery Sinergy Team* yang dapat membantu masyarakat menyelamatkan arsip yang rusak. “Misalnya saja ada arsip penting yang rusak karena terkena banjir. Tim kami akan melakukan upaya *recovery* semaksimal mungkin mendekati kondisi aslinya. Namun, jika arsip tersebut terbakar, maka kami tidak bisa memperbaikinya,” katanya.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

kemudian akan menyertakan surat rekomendasi kepada instansi yang berwenang menerbitkan arsip untuk dapat mengeluarkan salinan baru. Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Agus Winarto mewacanakan inovasi layanan untuk mempermudah pengurusan berbagai dokumen penting yang hilang atau rusak akibat kebakaran. “Jika dokumen-dokumen itu disimpan di rumah dan kebetulan hilang atau rusak akibat rumahnya

mengalami kebakaran, maka pemilik pasti akan kerepotan jika mengurus dari awal. Kami mewacanakan agar pengurusan dokumen penting itu dipermudah khusus untuk korban kebakaran,” tuturnya.

Inovasi-inovasi kearsipan yang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta merupakan sebagai upaya penyelamatan arsip keluarga yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Departemen Kesehatan RI 1988). Arsip keluarga secara natural akan tercipta sebagai endapan dari semua proses dinamika kehidupan. Keluarga sebagai unsur terkecil dalam masyarakat akan memberikan peran yang cukup besar kepada bangsa diawali dengan menerapkan sistem pengelolaan dari semua dokumen yang tercipta dan bernilai guna. Apabila dalam keluarga telah memahami arti pentingnya arsip dan memperlakukan arsip sebagai sumber informasi, maka terciptalah arsip yang tertata sesuai dengan fungsinya, diharapkan dapat menerapkan sistem tersebut pada wadah yang lebih luas lagi seperti diterapkan di lingkungan pekerjaan dari masing-masing anggota keluarga. Sehingga dapat menjangkau skala yang lebih luas lagi dan lagi sampai pada level suatu bangsa. Tingkat keberadaan suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya.

Salah satu aset yang paling berharga dalam keluarga adalah arsip. Arsip merupakan warisan yang

tidak ternilai harganya dibandingkan dengan benda warisan lainnya. Karena arsip dapat menjadi bukti autentik dari kepemilikan. Oleh karenanya, arsip perlu dirawat, dipelihara dari berbagai faktor yang dapat merusak baik fisik maupun informasi yang terkandung di dalam arsip tersebut.

Arsip keluarga adalah khazanah arsip atau manuskrip yang tercipta sebagai informasi terekam mengenai keberadaan dan peran individu anggota keluarga dalam hubungannya dengan masyarakat serta cara mereka dalam mengelola kekayaan keluarga (Hadiwardoyo, 2002).

Arsip keluarga merupakan dokumen atau informasi penting bagi setiap anggota keluarga (suami, istri, anak) untuk berbagai urusan, seperti urusan rumah tangga, kantor, sekolah, kampus, bank, pajak, asuransi, litigasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Pengelolaan arsip keluarga merupakan sebuah langkah kecil namun memiliki dampak besar. Arsip keluarga merupakan bukti keberadaan individu sebagai satuan terkecil dalam masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh negara. Kesadaran dalam mengelola arsip keluarga merupakan kontribusi individu untuk kemajuan anggota keluarga yang berperan mendukung aktivitas keluarga dalam penerapannya di lingkungan pekerjaan atau lingkungan sosial lainnya. Hal tersebut merupakan wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan.

Melihat pentingnya keberadaan arsip keluarga, ANRI pun memiliki program Layanan Restorasi Arsip Keluarga (Laraska). Melalui program ini, ANRI mereservasi dan meningkatkan aksesibilitas arsip statis yang memiliki nilai guna tinggi yang

rusak salah satunya akibat bencana. Laraska pertama kali dimulai pada tahun 2004 sesaat setelah tsunami besar menghantam Aceh dan Nias di akhir tahun itu. Pelayanan ini pun diberikan secara gratis kepada masyarakat. Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Dr. Kandar, menyebut dokumen perlu untuk dijaga dengan baik, salah satu cara mudah yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mendigitalisasikannya. “Kalau ada arsip yang rusak, kami siap melayani untuk membantu dan melatih dalam melindungi arsip,” ujar Kandar.

Membudayakan pengelolaan arsip keluarga merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan nasional yang dilaksanakan melalui penciptaan, pemberkasan, perlindungan, dan penyelamatan. Dengan demikian, arsip keluarga yang dimiliki oleh setiap keluarga di Indonesia akan terjamin autentisitasnya, tertata informasinya, terlindungi fisiknya, dan terselamatkan informasi dan fisiknya sebagai memori kolektif untuk kepentingan seluruh anggota keluarga dan warga bangsa.

Pada akhirnya, seluruh pemangku kepentingan, baik peran serta lembaga kearsipan maupun peran serta masyarakat, perlu bersamasama bergandengan tangan menjaga dan merawat arsip sesuai kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing guna mewujudkan Indonesia Maju. Arsip Terawat, Indonesia Kuat. Arsip Utuh Indonesia Maju. (is)

Harry Bawono

ARSIP KOMUNITAS: KEGEMBIRAAN AKAR RUMPUT MENG-ARSIP-KAN DIRINYA

Arsip Komunitas (Community Archives) (untuk selanjutnya disebut AK) lahir karena arsip yang terkumpul pada lembaga-lembaga kearsipan arus utama terlalu fokus pada arsip formal (lahir dari organisasi formal) yang didalamnya kurang merepresentasikan suara kalangan non-elit, akar rumput dan pihak yang terpinggirkan (Flinn, 2007). Ketika arsip formal ini mendominasi sebagai bahan dalam membangun ingatan-kolektif, tak ayal banyak suara yang tak tersuarakan.

Terdapat dua perspektif yang dapat digunakan untuk melihat kehadiran AK ini, dia sebagai simbol perlawanan terhadap ingatan kolektif-resmi, dia sebagai pemer kaya dari ingatan kolektif-resmi. AK sebagai simbol perlawanan merawat kisah ingatan yang bertolak belakang dengan ingatan kolektif-resmi. Contoh AK perlawanan misalnya, Perpustakaan Online Genosida 1965-1966 (<http://19651966perpustakaanonline.wordpress.com/>), AK ini menghimpun berbagai dokumentasi tentang peristiwa G30S/(PKI) dan dampaknya yang bertolak belakang dengan narasi negara. AK sebagai pemer kaya, merawat kisah ingatan yang berbeda namun relatif tidak bertolak belakang dengan ingatan kolektif-resmi karena variasi kisah yang belum cukup terceritakan dalam ingatan kolektif-resmi. Contoh AK sebagai pemer kaya misalnya, *Indonesia Visual Art Archives (IVAA)*, AK ini merawat dan menghimpun berbagai arsip/dokumentasi kegiatan seni Indonesia, khususnya seni visual yang selama ini terlewatkan oleh negara. Kedua perspektif ini hanyalah persoalan titik pandang, AK perlawanan dapat juga

dipandang sebagai AK pemer kaya dan sebaliknya.

Pada kesempatan ini, penulis menggunakan perspektif AK sebagai pemer kaya. Melalui perspektif ini, baik AK yang melawan maupun memper kaya ingatan kolektif-resmi pada dasarnya sama-sama merupakan sumber yang justru dapat menyeramakkan ingatan kolektif-resmi, seperti orkestra, simfoni indah tercipta karena variasi nada teramu sedemikian rupa. Dalam artikel ini penulis akan merunut asal usul konsep AK, kemudian melihat kasus AK tersebut dalam konteks keindonesiaan.

Jejak Arsip Komunitas: Pertalian Teori dan Praktik Lapangan

Flinn (2007) mendefinisikan konsep AK sebagai aktivitas pendokumentasian, pengarsipan dan menyelidiki warisan komunitas yang didalamnya partisipasi, kontrol dan kepemilikan komunitas atas kegiatan atau aktivitas tersebut adalah unsur yang esensial. Geliatnya sendiri mulai kentara sejak abad ke-17 melalui kelompok-kelompok yang tanggap terhadap sejarah lokal, kian

menguat dan ramai pada kisaran 1960an hingga 1980an berbarengan dengan menguatnya gerakan buruh, perempuan dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual and Transgender) dan berkembang hingga saat ini dengan momentumnya pada tahun 2000-an (Flinn, 2007). Hal ini dapat dilacak dalam laporan *Archives Task Force (ATF)* yang pada 2004 menyampaikan bahwa telah terjadi pertumbuhan pesat pada inisiatif akar rumput dalam mengelola dan membagikan variasi kisah melalui arsip komunitas mereka (Archives Task Force, 2004). Inggris dapat dikatakan sebagai pelopor yang membicarakan geliat AK ini dalam perspektif ilmiah kearsipan (Flinn, 2007)(Flinn, 2011). Rukus! sebagai AK yang menghimpun arsip komunitas LGBT kulit hitam Inggris dan *Future Histories* yang menghimpun arsip pertunjukkan seni Afrika, Asia dan Karibia, adalah salah dua dari sekitar 3000 AK yang eksis di Inggris (Flinn, 2007)(Flinn, 2011). Hingga kini gairah komunitas arsip tersebut, khususnya untuk kawasan Britania Raya dan Irlandia, terwadahi dalam CAHG (*Community Archives and Heritage Group*) dan secara digital dalam jaringan di <https://www.communityarchives.org.uk/>.

Derap langkah AK yang ramai kemudian benar-benar diinsyafi oleh komunitas kearsipan (*archival community*), termasuk negara didalamnya sebagai bagian dari jaringannya untuk menghimpun

warna-warni kisah ingatan akar rumput. Inggris Raya menjadi contoh penting untuk kasus ini, Arsip Nasional Inggris Raya (*The National Archives*) menerbitkan Pedoman tentang Praktek dan Prinsip Pengelolaan Arsip untuk Kalangan Non-Arsiparis (*Archive Principles and Practice: an introduction to archives for non-archivists*) yang didalamnya salah satu sasarannya adalah AK. Bahkan, salah satu Arsip Regional di Inggris, *West Yorkshire Archives* memiliki skema akreditasi bagi AK di wilayahnya (lihat: <https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives/archive-principles-and-practice-an-introduction-to-archives-for-non-archivists.pdf>, akses 24 November 2019).

Praktik AK pada tataran keseharian ditangkap dalam kerangka teoritik oleh komunitas kearsipan. Kemudian, melalui kerangka teoritik tersebut lahir berbagai penelitian yang menemukan signifikansi AK bagi kerekatan sosial (Flinn, 2011). Temuan ini menjadi dasar munculnya kebijakan negara yang menyokong kiprah AK agar tetap berkesinambungan dalam masyarakat.

Arsip Komunitas di Indonesia: Warna-warni Ingatan dalam Beda Semesta

Sejauh pembacaan penulis, geliat AK di Indonesia menemukan momentumnya pada kisaran 2010-an ketika sejumlah organisasi yang menaruh perhatian pada kegiatan pendokumentasian dan pengarsipan aktivitas budaya, mengorganisasikan diri dalam Jaringan Arsip Budaya Nusantara (JABN). Sangat bisa jadi masih banyak AK yang belum terdeteksi diluar JABN ini. Dalam JABN terdapat 6 AK yang berhimpun, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), *Indonesian Visual Art Archives* (IVAA), Institut Dayakologi, Museum Nusa Tenggara Timur, Studio Audio Visual Puskat, dan Tikar Media Nusantara (Alit Mranani, 2014). Dari keenam tersebut, salah satu yang paling aktif adalah IVAA.

Baru-baru ini, pada kisaran November 2019, IVAA turut serta aktif pada suatu acara yang didalamnya IVAA memamerkan arsip disabilitas. Kemudian, pada bulan yang sama, melalui acara yang bertajuk "Pusparagam Pengarsipan: *The Possibility of Socially Engaged Archiving*", IVAA ingin merayakan berbagai rupa tradisi pengarsipan dalam masyarakat. Salah satu yang kegiatan yang dipresentasikan dalam acara ini misalnya, pengarsipan arsip penyair-penyair Madura.. Melalui program ini pula, IVAA ingin turut serta menguatkan semangat pengarsipan yang selama ini telah terpupuk dalam masyarakat. Jangan tunggu segala sumber daya mapan, lakukan sebisanya, yang terpenting arsip budaya terselamatkan dan dapat dimanfaatkan selanjutnya untuk kepentingan masyarakat luas, begitulah kira-kira semangat yang terus ingin digetoktulkarkan oleh IVAA (instagram id:@ivaa_id).

Jika diperhatikan, AK dan Negara melihat arsip dengan cara yang berbeda. Negara memilih kerangka formal sehingga tidak heran arsip dalam imajinasi negara di dominasi oleh arsip formal, misalnya kartu tanda penduduk, sertifikat tanah dan yang sejenisnya. Sementara, AK lebih melihat arsip sebagai metaforikal dalam artian mekanisme distribusi dan akumulasi pengetahuan komunitas (arsip sebagai metaforikal, lihat, Cunningham, 2016). Maka tidak heran dalam pandangan AK, arsip jauh lebih luas, misalnya kain tenun pun termasuk salah satu wujud arsip (Lisis, Direktur IVAA, Sosialisasi Jurnal Kearsipan, Yogyakarta, 10 Oktober 2019). Karena melalui kain tenun, makna yang ingin ditransmisikan lintas generasi dalam sebuah masyarakat budaya tertentu terdokumentasi dalam motif tenun dan cara pengerjaan kain tenun tersebut. Kain tenun adalah salah satu bentuk pengetahuan tradisional. Dalam perspektif metaforikal ini, segala rupa teknologi perekaman dan pendistribusian pengetahuan yang dilakukan secara oral/lisan atau

disebut pengetahuan tradisional pun juga dapat dikategorikan sebagai arsip (Cunningham, 2016) (Bastian, 2013).

AK dan lembaga kearsipan arus utama mengarsipkan semesta yang berbeda. Hal ini menjadi salah satu faktor, arsip ala AK luput dari radar lembaga kearsipan arus utama (baca:negara). Kendati demikian, AK dengan gembira mengarsipkan aktivitas mereka, berbagi kisah mereka dan mengkonsolidasikan diri demi keberlangsungan lintas generasi dunia mereka melalui pengarsipan.

Ekosistem Sinergi: Negara dan Arsip Komunitas

Kebijakan negara pada dasarnya sudah cukup akomodatif terhadap AK. Hal ini dibuktikan dengan adanya materi peran serta masyarakat dalam UU No.43/2009 tentang Kearsipan. Persoalannya, negara memiliki keterbatasan sumber daya yang membuatnya mau tidak mau harus ada seleksi, maka tidak heran banyak hal yang luput. Dalam kondisi ini, masyarakat menyadari, AK pun tumbuh, menangkap hal yang luput itu. Namun, diperlukan sokongan agar terbentuk ekosistem yang memungkinkan AK melipatgandakan diri dan energi positif mereka. Untuk melakukan hal ini, negara perlu meluaskan perspektifnya dalam melihat arsip agar dua semesta dapat berbincang dengan sukacita. Baru-baru ini, sistem JIKN yang dikembangkan ANRI memberikan ruang untuk komunitas dapat ikut serta didalamnya. Selain itu, muncul diksi "pengarsipan budaya dan budaya pengarsipan" dalam dokumen rancangan renstra ANRI 2020-2024. Kedua hal ini menjadi titik awal yang cerah bagi relasi negara-AK. Sinergi negara-AK akan berlangsung hebat ketika ditangani dengan saling memahami satu sama lain. Sinergi ini penting agar temali dua semesta kearsipan ini terkoneksi dan dapat saling menyeramakkan dengan mesra.

Raistiwar Pratama

BERKOMUNITAS PENGARSIPAN

Komunitas merupakan paradigma keempat menurut gagasan Terry Cook (2013). Lebih lanjut Fiorella Foscarini (2017) mengembangkan gagasan tersebut untuk penyusutan dan penilaian secara lebih luwes sesuai saran Cook. Semangat berkomunitas pengarsipan ini serupa *crowd-sourcing* dan *citizen journalism*. Dus, kalangan praktisi dan teoretisi kearsipan mengemukakan gagasan *archiving me* atau *citizen archiving*. Dewasa ini, istilah serupa mengemuka, seperti *participatory archives* dan *community archives*. Berawal dari konsep dan praktik *post-custodial* bahwa siapa pun dapat menyimpan, mengolah, dan memberikan akses terhadap arsip di mana pun, Australia mengembangkan model rangkaian arsip (*records continuum*) dari model daur hidup (*life cycle*). Kanada pun turut mengembangkan pendekatan total *archives* dan *a network of networks*, salah satunya melalui gagasan mendiang Terry Cook perihal *macro-appraisal*. Belanda pun tidak ketinggalan, melalui Eric Ketelaar (1999), mengembangkan *archivistiek* bernuansa sosial dan budaya, suatu pengarsipan (*archivalization*) yang mensyaratkan partisipasi. Masih menurut Ketelaar, pengarsipan melestarikan "... konteks keagamaan, kebudayaan, politis, dan ekonomis". Paradigma (ber)komunitas menempatkan trilogi fungsi-kegiatan-transaksi sebagai pencipta arsip yang mulai dikenal sebagai *functional provenance*.

Empat Paradigma

Mengembangkan konsep paradigma yang semula Thomas S. Kuhn gagas, Terry Cook mengartikannya sebagai "kerangka"

atau "gagasan kearsipan" bukan "suatu pencapaian ilmiah yang diakui secara universal dan secara sementara menggambarkan masalah dan solusi bagi para praktisi." Paradigma bukanlah periodisasi atau pembabakan sejarah. Cook memperkenalkan empat paradigma: bukti, memori, identitas, dan komunitas.

Sejak akhir Abad XIX atau pra-modern, hanya negara yang melakukan peranan kearsipan. Penyusutan belum terjadi karena tidak ada penilaian, sepenuhnya merupakan ranah pencipta arsip. Hilary Jenkinson menyuburkan pandangan ini dengan menyatakan bahwa arsiparis harus mampu bersikap imparisial dan menjaga Kebenaran. Arsiparis sebagai "penjaga pasif" menurut Cook atau "wali pasif" menurut Theodore Schellenberg. Bukti adalah alat dan barang bukti. Nilai kebukitan merupakan nilai primer setiap arsip yang hanya berguna bagi pencipta arsip, demikian menurut Schellenberg. Akuntabilitas menjadi dasar setiap kegiatan, terutama lembaga pemerintah. Arsip sebagai bukti merupakan salah satu dari tiga (setelah informasi, sebelum aset) cakupan dalam definisi ISO 15489-1: 2016.

Menurut Jeannette A. Bastian (2017: 272), sulit menemukan kajian memori yang empiris dari arsiparis. Cook menggagas *macro appraisal* yang sekalipun terjadi penyusutan dan penilaian namun konteks pengarsipan tetap lestari. Penilaian yang bukan semata karena alasan penyusutan, penyerahan, dan penyimpanan menjadi penanda khas paradigma kedua (1930 – 70) atau modern.

Arsiparis berperan sebagai sejarawan karena memiliki pengetahuan mengenai pelaku, peristiwa, dan apa saja yang telah terjadi. Arsiparis dan lembaga kearsipan berperan sebagai "penilai aktif" dan "pembentuk aktif" menurut Terry Cook. Di sinilah nilai sekunder yang mencakup nilai sejarah dan budaya suatu arsip tidak lagi berguna untuk penciptanya tetapi fungsi kinerja penciptanya bisa dipahami sepanjang masa. Arsip adalah "kepingan" dari—dan sama sekali bukan—peristiwa. Maka dari itu, Verne Harris menekankan pentingnya keadilan dan pengarsipan. Setiap peristiwa harus dilihat dari banyak sudut, terutama sudut korban atau warga yang seringkali tidak punya akses atas kekuasaan dan kedekatan terhadap penguasa. Pengarsipan selalu berkaitan dengan "mengingat", "melupakan", dan "membayangkan" yang merupakan bagian dari *house of memory*.

Berkembang sejak dasawarsa 1970-an, seiring menguatnya kearsipan sebagai ilmu. Identitas merupakan paradigma antara, statist approach menuju *societal approach*. Transformasi digital mengawali paradigma ini dan negara harus bermitra karena dia merupakan salah satu dari banyak komunitas. Seiring mengemukanya pendekatan Australian (Series) System yang lebih mengarusutamakan fungsi daripada struktur, konsep-konsep dasar seperti "asal-usul" dan "aturan asli" pun berubah. Deskripsi tidak lagi secara berjenjang dari atas ke bawah. Pendekatan daur hidup berkembang menjadi pendekatan rangkaian arsip. Pendekatan fungsi juga mensyaratkan kerjasama dengan pencipta arsip

untuk memastikan pemberkasan berjalan sesuai sehingga ketika tiba waktunya arsip diputuskan bernilai sejarah, arsip tersebut dapat diakses luas.

Di Kanada, dengan keragaman asal usul warganya dan meningkatnya keinginan berperan serta, peralihan itu dikenal sebagai paradigma total archives lalu berkembang lebih lanjut menjadi *a network of networks*. Bentuk partisipasi—sebagaimana saran Jacques Derrida dalam *Archives Fever*—sebagai prasyarat utama, pada zaman digital telah berkembang dengan sebutan yang beragam, salah satunya *Participatory Archives* menurut Alexandra Eveleigh (2017: 299) yang “... mengajak selain-arsiparis—biasanya melalui media sosial,” dan *Community Archives* menurut Rebecka Sheffield (2017: 351) yang hendak “... mengumpulkan warisan dokumenter yang mencerminkan identitas, pengalaman, dan kepentingan kita bersama”. Menurut Benedict Anderson (1983/ 2006), bangsa merupakan komunitas yang dibayangkan justru karena penduduknya tidak mengetahui dan mengenal satu sama lain namun merasakan sebagai satu bagian betapa pun beragamnya. Selain terbitan (koran, majalah, tabloid, harian, pekanan, dan bulanan) dan cetakan (buku teks, ejaan bahasa nasional), arsip dan manuskrip merupakan medium di mana gagasan mengenai komunitas disalurkan dan dipahami bersama. Secara terus menerus dan berulang-ulang oleh berbagai pencipta arsip, mulai dari individu, organisasi, hingga lembaga pemerintah. Pengelola kearsipan (siapa pun yang menjalankan peran pengarsipan) dan lembaga kearsipan berperan sebagai fasilitator berbagai komunitas, menengahi dan menjembatani berbagai kepentingan bersama untuk membangun rumah ingatan bersama yang lazim dikenal sebagai memori kolektif.

Paradigma Berkomunitas (di) Indonesia

Berada di perlintasan, Indonesia

dipengaruhi tumbuh kembang gagasan kearsipan, terutama oleh Belanda. Hingga *Landsarchief* berdiri pada 1892, wacana kearsipan jajahan dipengaruhi paradigma bukti ketika perdagangan yang VOC lakukan menghendaki pencatatan administrasi dan keuangan yang rapi dan mudah ditemukan. Sepanjang 1892 hingga 1971, paradigma memori melengkapi di mana arsip semata sebagai sumber primer historiografi baik oleh penjajah (Neerlando-sentris) maupun oleh jajahan (Indonesia-sentris) dan Ilmu Kearsipan hanya sebagai salah satu ilmu-ilmu bantu dari Ilmu Sejarah. Sepanjang 1971 – 2009, paradigma identitas mengemuka seiring pendirian berbagai jurusan dan program studi Ilmu Kearsipan sebagai ilmu terapan di bawah bayang-bayang Ilmu Administrasi dan Ilmu Perpustakaan. Secara teoretis dan legal, UU 43/ 2009 menandai bermulanya paradigma komunitas di mana “peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan” (lihat Pasal 14 dan Pasal 71 – 76) secara tersurat termaktub. “Peran serta masyarakat” tersebut mencakup peran perseorangan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan dalam “penyelenggaraan kearsipan” yang meliputi “pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan.

Antara Yogyakarta dan Jakarta

Bermula sebagai Yayasan Seni Cemeti pada 1995, *Indonesian Visual Art Archive* (IVAA) terus berkembang mengumandangkan “Demokrasi yang lain itu mungkin,” begitu tulis Lisistrata Lusandiana di Buletin IVAA Dwi Bulanan Edisi Juli-Agustus 2019. Selain menyimpan dan meminjamkan koleksi arsip para seniman, IVAA juga menerbitkan Buletin, menyelenggarakan pelatihan (salah satunya Pusparagam Pengarsipan: *The Possibility of Socially Engaged Archiving* pada 19 – 21 November 2019), memberikan hibah (salah satunya pada 2013, Hibah

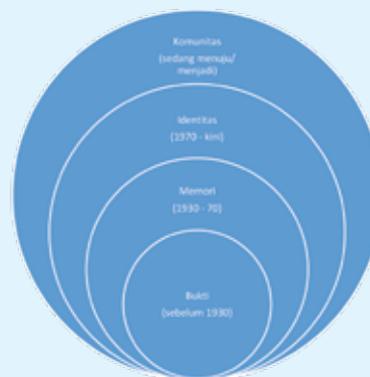
Kembangkan Arsip Budaya (Karya)! Jaringan Arsip Budaya Nusantara [JABN]), dan melakukan pameran berkala di Lantai 2. Di sini “pengarsipan” menggantikan “kearsipan” untuk menekankan pentingnya keterlibatan antara seniman dan masyarakat. Bagi IVAA, apapun yang bernilai seni dan menyejarah merupakan arsip sehingga wajib (di)lestari(kan). Sesuai namanya, Warung Arsip (WA) menjual arsip klipng koran dalam bentuk digital. Berbeda dengan IVAA, WA jelas-jelas hidup dari jual-beli. Masih di Yogyakarta, bersemangatkan Galleries, Libraries, Archives and Museums (GLAM), Wikimedia Indonesia melakukan digitalisasi dan transliterasi koleksi Museum Dewantara Kirti Griya.

Di Jakarta pun demikian. Pusat Dokumentasi Sastra Hans Bague Jassin (PDSHBJ) serta Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHUI) dan Sinematek merupakan beberapa di antaranya. Kabar terakhir, Pemerintah Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengelola langsung PDSHBJ setelah alami kesulitan pendanaan, keadaan yang Sinematek sedang alami. Seakan-akan melengkapi keberadaan Sinematek, Harkopo Lie di Jambi tetap melestarikan pemutar film melalui pendirian Museum Bioskop dan Tempo Art Jambi, serta mengadakan berkala Festival Budaya Bioskop Jambi. Pada arsip bermediumkan analog, keberadaan “artefak alat baca” merupakan arsip itu sendiri karena menentukan “keterpakaiannya”, salah satu dari persyaratan otoritatif arsip menurut ISO 15489-1: 2016.

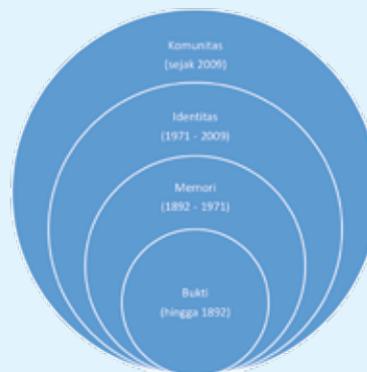
Kerja pengarsipan yang mereka lakukan mungkin tidak sebanding dengan apa yang dilakukan The *Corts Foundation* dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam Sejarah Nusantara, *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde* (KITLV) dan *Universiteit Leiden, Nationaal Archief* (NA), Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN)



Keterkaitan Antar-Paradigma



Paradigma Kearsipan Dunia



Paradigma Kearsipan Indonesia

Syarif Hidayatullah, *the Centre for the Study of Manuscripts and Culture (CSMC) Universität Hamburg*, dan *Arcadia* melalui *Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia (Dream Sea)*, dan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa). Namun mereka menjalankan “peran serta masyarakat”.

Penutup

Secara teknis, penilaian terkait erat dengan penyusutan, terutama untuk mengurangi medium arsip. Penilaian dan penyusutan tidak hanya bersemangatkan “simpan, serah, dan musnah” tetapi membentuk bukti apa yang layak disimpan, dipindah, dan dimusnahkan; lalu bukti itu kelak membentuk memori negara-bangsa di mana identitas mengemuka dari setiap komunitas. Memahami

keempat paradigma tersebut, harus disertai pemahaman menyeluruh terhadap penilaian. Penilaian makro menyertakan setiap sudut pandang pencipta arsip sehingga menghasilkan sudut pandang terhadap peristiwa secara agak utuh. Terjadilah apa yang disebut dengan intersubjektifitas karena peristiwa hanya terjadi sekali dan mustahil diulang.

Keterbukaan digital semakin membuka lebar partisipasi. Keberadaan big data bahkan sangat mungkin menghasilkan narasi sejarah jangka panjang (*longue durée*). Transformasi digital berpengaruh pada penciptaan, distribusi, penyimpanan, dan akses terhadap informasi. Arsip sebagai sumber informasi pun berubah. Zaman ketika arsip begitu cair, metafora bentukan sosiolog Zygmunt Bauman. Ketika semesta

kearsipan begitu jamak, meminjam metafora filsuf William James. Kearsipan tidak lagi mencakup trilogi administrasi-hukum-sejarah, melalui informasi kini mencakup teknologi-sosial-budaya. Apa yang lebih penting adalah penciptaan, bukan hanya para pencipta (*co-creation*) dan penilaian kuratif (*curate*) menurut Leisa Gibbons (2014) melengkapi dimensi-dimensi rangkaian arsip sebelumnya. Masyarakat tidak hanya terlibat dalam pluralization tetapi juga *capture*, *organize*, dan *curate*.

Sery Herawati

PEMBINA KEARSIPAN YANG KOMUNIKATIF

“Arsip sebuah kata yang asing bagi mbah Sanikem yang tinggal di sebuah dusun di kaki gunung, waktu Pak Kepala Dusun menanyakan kelengkapan surat surat ketika ia mengurus surat kepemilikan tanah yang ditinggalinya. Pikirnya untuk apa ada surat surat itu, bahkan namanya pun ia baru dengar, seingatnya tanah yang dimilikinya warisan dari ayahnya dan ayahnya diwarisi dari ayahnya, bahkan ada beberapa orang sebagai saksi ketika tanah itu diwariskan, terus kenapa pemerintah mempertanyakan kepemilikan tanahnya padahal mereka tidak memiliki keterkaitannya dengan tanah itu?”

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU no 43 Tahun 2009 pasal 11 ayat ayat (1) Pembinaan kearsipan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan padapoin c menyebutkan bahwa “pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan”. Artinya pembinaan yang harus dilaksanakan tidak hanya sebatas pembinaan ke organisasi melainkan juga ke masyarakat. Di dalam penjelasan UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pada 3 huruf (d) Yang dimaksud dengan hak-hak keperdataan rakyat meliputi: hak sosial, hak ekonomi, dan hak politik dan lain-lain yang dibuktikan dalam arsip misalnya sertifikat tanah, ijazah, surat nikah, akte kelahiran, kartu penduduk, data kependudukan, surat wasiat, dan surat izin usaha.

Secara umum seluruh undang-undang tersebut sudah dilaksanakan oleh para arsiparis terutama dalam pelaksanaan pembinaan, akan tetapi bagaimana hasilnya? apakah pernah dilakukan evaluasi tingkat keberhasilannya?

Lazimnya para arsiparis hanya menyampaikan seadanya, sekenanya tanpa ada parameter yang jelas dan terukur dalam menilai keberhasilannya. Sebelum jauh membicarakan pembinaan, hal

pertama yang harus dilakukan adalah mengkomunikasikan arsip itu sendiri.

Komunikasi efektif bila pertemuan antara pemangku kepentingan terbangun dalam situasi komunikatif-interaktif dan menyenangkan. Efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh validitas informasi yang disampaikan dan keterlibatan dalam memformulasikan ide atau gagasan secara bersama. Jadi komunikasi antara arsiparis dan masyarakat akan terjalin dengan baik, manakala antara arsiparis dan masyarakat mensejajarkan diri.

Ciri kesejajaran adalah penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak, bisa dipahami oleh masyarakat maupun Arsiparis. Penggunaan bahasa lokal yang umum digunakan oleh suatu masyarakat akan jauh efektif digunakan dalam berkomunikasi karena akan menghilangkan “kecurigaan” yang mungkin muncul ditengah komunikasi yang sedang berlangsung.

Beberapa saran untuk mempertahankan sebuah hubungan agar tetap terjaga dengan baik:

1. Bersikap ramah; dalam sebuah hubungan antarpersonal seseorang harus bersikap ramah, sopan dan menyenangkan agar selalu muncul rasa nyaman dalam menjalani

hubungan. Sikap arogan, egois, dan temperamen harus sebisa mungkin dihindari karena itu dapat membuat orang dalam hubungan itu menjadi tidak nyaman dan mungkin merasa terganggu.

2. Komunikasi sesering mungkin; komunikasi yang baik sangat penting dalam mempertahankan keharmonisan dalam sebuah hubungan. Komunikasi sebaiknya dilakukan sesering mungkin walaupun itu dalam bentuk yang sederhana, seperti menanyakan kabar atau kesibukan yang sedang dilakukan. Hal ini merupakan sebuah cara untuk mempertahankan kontak. Berbicara tentang kejujuran, keterbukaan dan berbagai perasaan serta merespon konflik dengan baik juga termasuk dalam komunikasi mempertahankan hubungan.

3. Sikap terbuka; sikap ini sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi dalam hubungan itu. Hal yang ditutupi dapat memicu sebuah konflik kedepannya. Apabila ada hal yang mengganjal sebaiknya dibicarakan secara baik-baik, baik itu dengan berdiskusi maupun menjadi pendengar yang baik. Sikap terbuka ini dapat dilakukan dengan menceritakan apa yang sedang dirasakan, menjadi pendengar yang baik, member masukan yang sesuai atau bisa juga dengan berempati terhadap lawan bicara kita.

4. Memberi jaminan; jaminan dalam sebuah hubungan sangat diperlukan. Misalnya saja menjamin saat orang yang berhubungan dengan kita akan bercerita tentang apapun kita pasti akan menjaga kerahasiaannya. Jaminan yang diberikan bisa juga

dalam bentuk pemberian rasa nyaman dan aman.

5. Aktivitas bersama; melakukan aktivitas bersama dapat mempererat sebuah hubungan. Misalnya saja belanja, jalan-jalan atau hanya sekedar makan bersama. Kalaupun tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan bersama, mendengarkan cerita tentang kegiatan seseorang juga bisa menjadi alternatif lain.

6. Berpikiran positif; hubungan antarpersonal pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan hubungan lain. Untuk mendapatkan hubungan yang harmonis maka orang yang terlibat di dalamnya harus senantiasa mencoba membuat interaksi yang menyenangkan dan berfikir positif. Usahakan jangan membuat berita atau berperilaku yang berpotensi menimbulkan isu dan argumen negatif.

7. Meningkatkan kemampuan diri; terus-menerus memperbaiki diri dengan tujuan untuk membuat orang yang berhubungan dengan kita merasa nyaman adalah tindakan yang sangat diperlukan dalam menjalin sebuah hubungan. Misalnya saja berpenampilan menarik dan enak dilihat

Menurut Thoha (2003) Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kema-juan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, ber-kembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada "perbaikan" atas sesuatu.

Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang ke-seluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu

pembangunan manusia seutuhnya.

Ada beberapa prinsip metoda pembinaan masyarakat yang perlu dipahami, antara lain :

1. Pembinaan masyarakat kearsipan yang dilaksanakan harus mampu menghasilkan masyarakat yang mampu dengan upayanya sendiri dapat mengatasi masalah-masalah kearsipan yang dihadapi, serta mampu mengembangkan kreativitasnya untuk memelihara setiap arsip yang dimilikinya

2. Kegiatan pembinaan masyarakat kearsipan sebaiknya dilaksanakan dilingkungan pekerjaan kearsipan, agar tidak banyak menyita waktu kegiatan rutinnnya dan pembina dapat memahami betul keadaan masyarakat dengan masalah-masalah yang dihadapi di lingkungannya sendiri sehingga mudah dipahami.

3. Kegiatan pembinaan akan lebih efisien jika diterapkan hanya kepada beberapa warga masyarakat terutama yang diakui oleh lingkungannya sebagai panutan yang baik.

4. Ciptakan hubungan yang akrab antara pembina dengan masyarakat. Hubungan yang akrab ini akan memperlancar kegiatan pembinaan. Selain itu , akan tercipta suatu keterbukaan dalam mengemukakan masalah-masalah kearsipan yang dihadapi dan masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pendapatnya. Dengan hubungan ini pembina dapat dengan senang hati diterima dalam lingkungan masyarakat tanpa ada prasangka.

5. Dalam kegiatan pembinaan, metoda yang diterapkan dapat merangsang masyarakat melakukan perubahan persepsi tentang kearsipan demi perbaikan mutu hidupnya sendiri

Berdasarkan media yang digunakan maka metoda pembinaan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu; (1) media lisan yang disampaikan secara langsung seperti percakapan tatap muka atau lewat telepon maupun secara tidak langsung, seperti; lewat radio dan televisi. (2) media cetak baik berupa gambar dan atau tulisan seperti; foto, majalah, selebaran, poster dll, yang dibagi-bagikan,

disebarkan atau dipasang ditempat-tempat strategis yang mudah dijumpai oleh masyarakat nelayan. (3) media terproyeksi, berupa gambar dan atau tulisan lewat slide atau pertunjukkan film.

Berdasarkan hubungan pembina dan masyarakat, maka metoda pembinaan ada dua macam, yaitu : (1) komunikasi langsung, baik melalui percakapan tatap muka atau lewat media tertentu, dimana pembina dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat dalam waktu yang relatif singkat ; (2) komunikasi tak langsung, baik lewat perantara orang lain atau media lain yang tidak memungkinkan pembina dapat menerima respons dari masyarakat dalam waktu yang relatif singkat.

Metoda pembinaan keadaan psiko-sosial masyarakat nelayan maka dapat dibedakan dalam tiga pendekatan, yaitu ; (1) pendekatan perorangan, seperti kunjungan ke rumah, kunjungan ke tempat kegiatan masyarakat; (2) pendekatan kelompok, seperti pertemuan di tempat penyelenggaraan latihan , pertemuan kelompok masyarakat; (3) pendekatan massal, seperti melalui televisi, radio, penyebaran selebaran. Metoda ini mencakup jumlah masyarakat yang sangat banyak dan tersebar tempat tinggalnya .

Pemilihan metoda pendidikan masyarakat harus lebih diutamakan pada metoda-metoda yang memungkinkan adanya dialog baik antara pendidik (pembina) dan yang didik (masyarakat) maupun antara peserta didik. Pemilihan metoda pendidikan masyarakat perlu mempertimbangkan : (1) waktu penyelenggaraan yang tidak terlalu mengganggu kegiatan, (2) waktu penyelenggaraan sesingkat mungkin, (3) lebih banyak menggunakan alat peraga. Selain itu, pemilihan metoda pembinaan ini lebih banyak mengacu kepada pemecahan masalah kearsipan yang sedang dihadapi dan akan dihadapi dibandingkan dengan upaya menambah pengalaman belajar baik yang berupa pengetahuan, sikap maupun ketrampilan- ketrampilan baru

Gayatri Kusumawardani

MENGULIK ARSIP KONTRAK TERNATE NO.231 “CONTRACT TUSSCHEN HET ENGELSHGOVERNEMENT EN DEN KONING VAN TERNATEN” MELALUI TRANSLITERASI ARSIP

Arsip kontrak Ternate adalah arsip berbentuk perjanjian antara dua atau lebih dari dua belah pihak yang dihasilkan pada masa Kesultanan Ternate. Kebanyakan arsip kontrak ini ditulis dengan dua format huruf dan bahasa, yaitu huruf Arab berbahasa Melayu/ Arab/ Ternate dan huruf latin berbahasa Inggris/ Belanda dan berisi tentang perjanjian perdagangan dan kekuasaan antara pihak Kesultanan Ternate dengan pihak asing. Arsip kontrak Ternate menarik untuk diketahui dan dibahas karena Ternate merupakan daerah di Maluku yang merupakan penghasil rempah-rempah di Indonesia terbesar dan Kesultanan Ternate merupakan kerajaan yang besar, kuat dan cukup disegani oleh pihak asing. Namun tidak semua arsip kontrak Ternate yang dibahas, tetapi hanya salah satu saja yang menurut penulis menarik.

Arsip kontrak yang akan kita bahas kali ini adalah arsip kontrak Ternate No. 231 (*Contract Tusschen het Engelschgouvernement en den Koning van Ternaten*). Arsip ini dipilih oleh penulis karena menyangkut kedatangan Inggris ke Ternate setelah berakhirnya kekuasaan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Arsip ini dihasilkan pada tanggal 23 November 1801. Arsip kontrak ini merupakan perjanjian antara Kesultanan Ternate dengan pihak Inggris. Arsip kontrak ini memakai kertas folio, terdiri dari 2 halaman cover depan & belakang, 19 halaman bertuliskan Arab Melayu



Cover (Halaman Depan Arsip Kontrak no. 231 (*Contract Tusschen het Engelschgouvernement en den Koning van Ternaten*))

dan Inggris, serta 8 halaman kosong. Format kontrak adalah sebelah kiri tulisan Arab berbahasa Melayu dan sebelah kanan tulisan latin berbahasa Inggris. Jumlah pasalnya adalah 18 pasal. Kondisi arsip masih dalam keadaan baik, sebagian korosi tapi masih bisa dibaca.

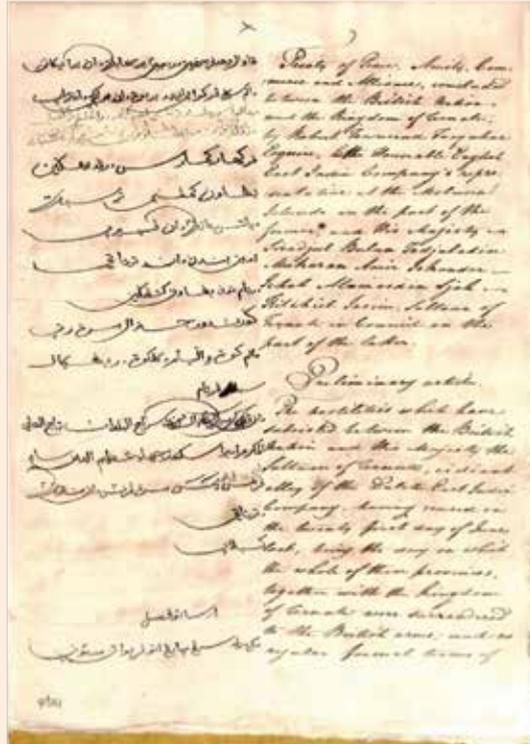
Sebelumnya, kita bahas dulu sekilas peristiwa sejarah yang melatarbelakangi arsip ini. Pada awal abad ke-18, VOC mulai mengadakan eksploitasi agraris. Hal ini disebabkan keuntungan dari usaha dagang semakin merosot akibat melimpahnya rempah-rempah dari jajahan Inggris, Perancis, Spanyol dan Portugis. VOC dengan giat menekan beberapa

daerah yang sudah dikuasai, seperti Banten, Priangan, Cirebon dan Mataram untuk mengumpulkan berbagai hasil bumi secara paksa baik dengan *contingenten stelsel*, *verplichte leverantie*, *preanger stelsel*, penjualan tanah kepada pihak swasta/ partikelir. Hingga akhirnya pada awal bulan Januari 1800, VOC mengalami kebangkrutan dan di bubarkan secara resmi. Tujuh tahun berikutnya, Perancis kemudian Inggris menguasai hak-hak milik Belanda di Indonesia.

Menjelang akhir abad ke-18 terjadi perubahan besar di Eropa dengan meletusnya Revolusi Prancis. Di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte, Prancis tumbuh

menjadi negara besar dan kuat yang menguasai hampir seluruh wilayah Eropa termasuk Negeri Belanda, kecuali Inggris. Penguasa Belanda Willem V Oranje yang melarikan diri ke Inggris tahun 1795 melalui surat-surat yang ditujukan kepada gubernur/penguasa di wilayah jajahan yang masih setia memerintahkan mereka agar menyerahkan koloni-koloni Belanda kepada Inggris “untuk keamanan” dibanding jatuh ke tangan Perancis. Belanda-Perancis (*Bataafsche* Republik) cemas akan kedudukannya di Indonesia terhadap serbuan Inggris. VOC yang semakin merosot kekuatannya tidak mungkin mampu menahan serangan Inggris. Oleh karena itu, pada akhir tahun 1799 VOC dibubarkan dan pemerintahan di negeri jajahan/daerah koloni langsung dipegang oleh pemerintah Belanda.

Pada 1 Januari 1800, Pemerintah Belanda secara resmi membubarkan VOC dan mengambil alih semua utang dan piutangnya. Semua wilayah milik VOC menjadi milik Pemerintah Belanda. Akan tetapi di Indonesia, termasuk Maluku, likuidasi VOC tidak memiliki pengaruh luas, karena personil serta pemegang jabatan masih tetap sama dan struktur administrasi pemerintahan masih belum berubah. Di Nusantara sendiri terdapat masa transisi sejak dibubarkannya VOC (1800-1808) yang dimulai dari pemerintahan Gubernur Jenderal Van Overstraten (1795-1801) hingga Gubernur Jenderal Wiese (1805-1808). Kemudian pemerintahan diambil alih oleh Gubernur Jenderal Herman William Daendels (1808-1811) yang di utus oleh pemerintah Perancis karena posisi Belanda yang saat itu menjadi vassal Perancis. Louis Napoleon sebagai penguasa Belanda merasa khawatir kalau Pulau Jawa sebagai jajahan Belanda direbut oleh Inggris. Inggris sendiri pada saat itu sudah mulai meluaskan daerah jajahannya di Nusantara dengan menduduki wilayah Bengkulu, Padang, Pulau Pinang, Ternate dan beberapa daerah lain di Maluku (penguasaan Inggris di Maluku dimulai tahun 1800-



Halaman awal surat kontrak, Bagian kiri bertuliskan Arab Berbahasa Melayu dan Bagian Kanan bertuliskan latin berbahasa Inggris

1804 dan 1810-1816).

Setelah sekilas membahas sejarah dibalik arsip ini, sekarang kita membahas tentang isi arsip ini. Arsip kontrak Nomor 231 dihasilkan pada masa pemerintahan Sultan Muhamad Yasin dengan nama kebesaran Paduka Sri Maha Tuan Sultan Siraj ul-Bilat Syah Taj ul-Aulia al-Mukarram Amir Iskandar Jihad Azim ud-din (dinobatkan 13-Mei-1801 dan wafat 10-Maret-1807). Sultan Muhamad Yasin merupakan putera kedua dari Sultan Arun Syah. Pada Juni 1801 Inggris berhasil merebut Ternate dari tangan pasukan Belanda, dan yang menjadi Residen Inggris pada tahun 1801 adalah Robert Townsend Farquhar dan ternyata kemenangan ini mendatangkan nasib buruk kepada Residen Inggris di Ambon, Robert Townsend Farquhar. Farquhar diberhentikan dari jabatan oleh atasannya di Madras, dengan alasan terlalu banyak biaya yang kelak harus dikeluarkan untuk mempertahankan

kota Ternate.

Surat kontrak ini ditandatangani pada 23 November 1801 oleh Sultan Muhamad Yasin sebagai perwakilan dari Ternate, bersama beberapa bawahannya yang berjumlah kurang lebih sembilan belas orang dan Robert Townsend Farquhar sebagai perwakilan dari Inggris.

Di dalam surat kontrak ini hanya menyebutkan tentang perjanjian perdagangan tanpa menyebutkan tentang pembagian kekuasaan, ini dikarenakan pada masa ini adalah masa transisi (*interregnum*) dari berakhirnya kekuasaan VOC dan adanya pengaruh kekuasaan Inggris di Ternate. Jadi masih ada pengaruh Inggris dan Belanda disini. Di dalam surat kontrak ini dijelaskan tentang aturan-aturan dalam melakukan perdagangan, harga-harga yang ditetapkan dan wilayah-wilayah perdagangan.

Cara penulisan tulisan arab

berbahasa melayu pada arsip ini termasuk agak sulit dibaca karena bentuk huruf dan interpretasi sang penulis kemungkinan berbeda dengan yang dimaksud sesungguhnya oleh yang mendiktekan bacaannya.

Membaca arsip kontrak Ternate berhuruf Arab berbahasa Melayu ini disebut dengan transliterasi. Kegiatan transliterasi merupakan kegiatan yang menarik dan menantang, terutama ketika kita harus bisa membaca huruf per huruf dan kemudian menemukan artinya. Definisi transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin adalah merupakan pengalihaksaraan huruf-huruf Arab ke Latin. Membaca arsip bertuliskan bukan huruf latin menurut penulis adalah menarik. Ketika penulis belum menjadi pegawai di Arsip Nasional RI dan belum menggeluti bidang kearsipan, setiap melihat arsip yang bertuliskan selain tulisan latin seperti paleografi, Arab Melayu maupun huruf Jawa (ha na ca ra ka), timbul rasa penasaran untuk mengetahui apa isi arsip tersebut. Menurut penulis, orang yang bisa membaca tulisan-tulisan tersebut termasuk orang “keren”. Ketika akhirnya penulis menjadi pegawai ANRI dan karena latarbelakang pendidikan S1 dari penulis adalah sejarah, maka beberapa kali diikutkan kursus untuk membaca arsip yang bertuliskan paleografi, Arab Melayu dan huruf Jawa. Namun baru pada tahun 2019 ini penulis mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan transliterasi arsip yang kebetulan menggunakan tulisan Arab berbahasa Melayu dan langsung ditunjuk sebagai koordinator tim dan kegiatan.

Dalam kegiatan ini, menggunakan arsip kontrak Ternate yang bertuliskan Arab berbahasa Melayu untuk ditransliterasi. Alasan memilih arsip kontrak adalah karena kegiatan transliterasi kali ini merupakan hal yang baru bagi penulis sebagai koordinator dan anggota tim lainnya



Halaman yang menandatangani surat kontrak

sehingga masih harus banyak belajar membaca. Dengan adanya surat kontrak atau perjanjian yang terdiri dari dua bahasa dan dua jenis huruf, maka mempermudah tim untuk melakukan transliterasi, jadi apabila mengalami kesulitan dalam membaca arsip bertuliskan Arab berbahasa Melayu, maka bisa merujuk ke huruf latin berbahasa Inggris atau Belanda di sampingnya. Kegiatan transliterasi arsip berhuruf Arab berbahasa Melayu sebenarnya tidaklah sulit apabila kita sudah pernah belajar mengaji atau membaca tulisan Arab dan sebenarnya transliterasi Arab Melayu ini lebih mudah daripada kita membaca tulisan Arab, karena tidak perlu menerjemahkan lagi. Arsip ini sudah berbahasa Melayu yang serumpun dengan Bahasa Indonesia sehingga tidak perlu diterjemahkan lagi.

Ketika membaca arsip tersebut dan melakukan transliterasi seolah-olah kita bisa masuk ke zaman ketika arsip itu dibuat, sehingga bisa berimajinasi seperti apa peristiwa yang terjadi pada masa itu. Apalagi dengan latarbelakang pendidikan penulis yang lulusan sejarah sehingga membuat rasa penasaran untuk lebih jauh ‘mengulik’ sejarah dibalik arsip

tersebut dibuat.

Kesulitan yang dihadapi ketika melakukan transliterasi arsip diantaranya adalah apabila arsip yang ditransliterasi sudah mengalami korosi, sobek dan guratan tintanya sudah tidak jelas sehingga ada huruf yang hilang atau tidak terbaca. Kemudian kesulitan yang lain adalah guratan penulis yang tidak terbaca dan tidak terpecahkan. Bisa jadi karena guratan tulisannya yang tidak bagus. Oleh karena itu perlu dilakukan kritisi terhadap tulisan dan penulis arsip tersebut. Kritisi diperlukan karena latarbelakang orang yang menulis arsip tersebut bisa mempengaruhi guratan tulisannya, seperti misalkan latarbelakang pendidikan, latarbelakang keluarga, latarbelakang kejiwaan, bahkan masalah pendengaran pun bisa kita kritisi karena bisa jadi antara apa yang didengar oleh penulis dengan kata-kata yang didiktekan oleh sang sultan atau pejabat yang berwenang berbeda. Namun kesulitan-kesulitan ini justru bisa menjadi tantangan dan semakin bersemangat untuk mengulik huruf demi huruf arsip tersebut. Hal inilah yang membuat penulis tertarik melakukan kegiatan transliterasi dan semoga para pembaca tulisan ini pun bisa menjadi tertarik juga untuk menekuni dunia transliterasi.

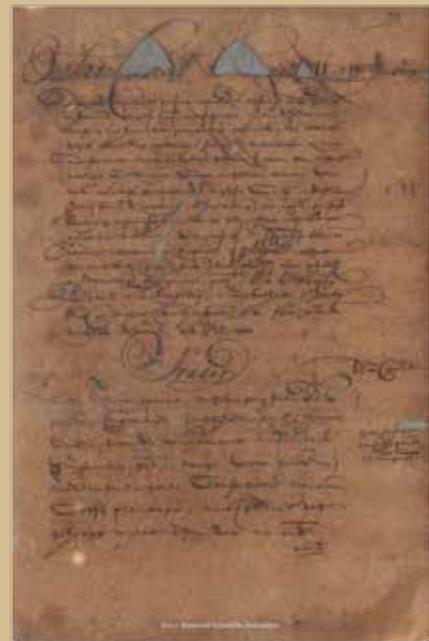
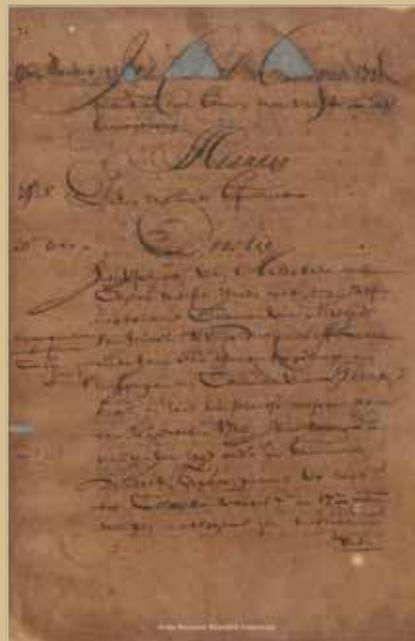
Jajang Nurjaman

PAHITNYA KOPI ERA VEREENIGDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE (VOC)

Tidak sulit untuk menemukan kedai kopi di era sekarang. Hampir di setiap sudut jalan kita bisa melihat kedai-kedai kopi bemunculan, dari mulai warung kopi yang biasa menyajikan kopi dengan *mie instant*, hingga toko kopi yang mewah tersedia di jalanan kota-kota dan desa-desa. Kopi memang tengah menjadi trend di masyarakat, terutama di kalangan muda-mudi. *A cup of Joe*, sebutan kopi yang terkenal ketika perang dunia melanda. Ternyata kopi sudah terkenal sejak zaman VOC datang ke Nusantara.

Asal Mula Kopi di Nusantara

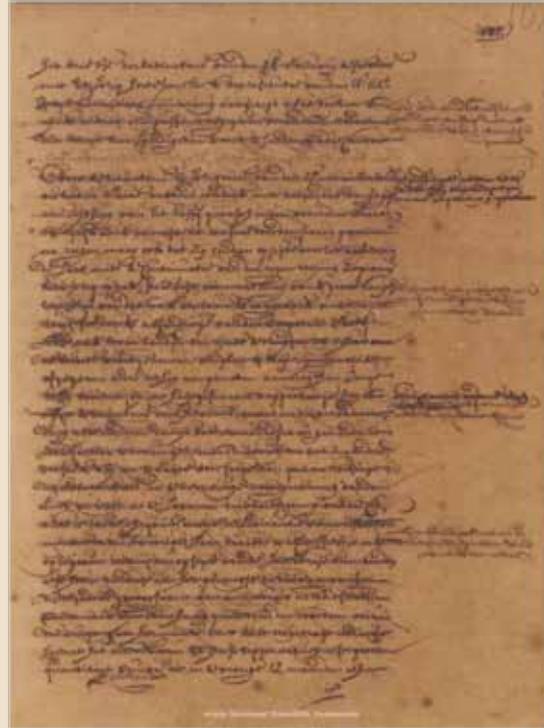
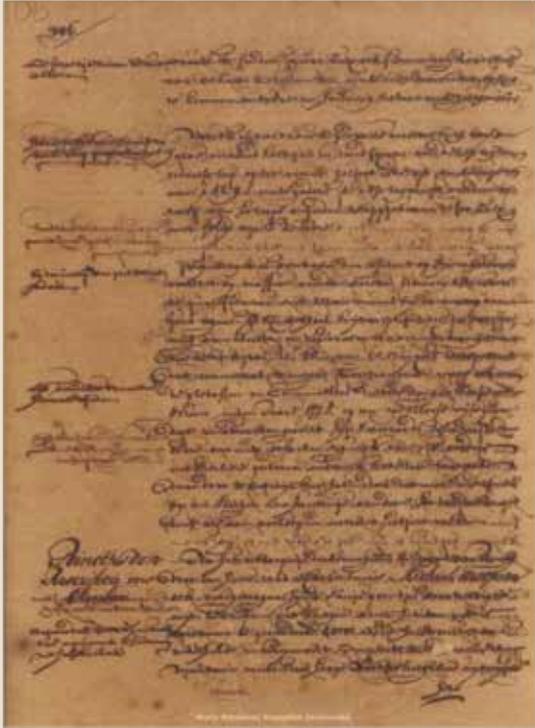
Kopi di Nusantara berawal dari perkenalan seorang Belanda, Pieter van den Broecke, mengenal kopi di Mokka, Yaman. Empat puluh tujuh tahun sesudahnya, kopi pertama tiba di Amsterdam dan membuat ketertarikan orang Belanda terhadap kopi. Bibit kopi kemudian dibawa ke Pantai Malabar. Dari Malabar, kopi zaman VOC tidak sekonyong-konyong datang ke Nusantara dan menjadi komoditas



Arsip Hoge Regering, VOC, No. 2535, hlm. 71-72, Konstitusi Perkebunan Kopi di Tanjungpura, Kerawang, tahun 1711.

utama ketika itu. VOC yang menjadi sebuah perusahaan multinasional mulai mengenal kopi ketika seorang Adriaan van Ommen, membawa bibit arabika ke Nusantara. Van Ommen sebagai seorang komandan VOC di Malabar, pada 1696 datang ke Batavia dan membawa bibit kopi *Arabica*

atas dorongan dari seorang walikota Amsterdam, Nicolaas Witsen. Kopi yang dibawa Van Ommen kemudian ditanam di daerah Kedaung yang sekarang bernama Pondok Kopi. Namun, kopi yang ditanam ini tidak tumbuh subur karena terserang bencana banjir. Walaupun kopi yang



Arsip *Hoge Regering*, VOC Nomor 959, hlm. 106-107, VOC mewajibkan setiap kepala keluarga di Cirebon untuk menanam 10 pohon kopi

ditanam ini kurang berhasil, namun ada sebagian kecil benih dari Batavia yang bisa dikirimkan ke kantor para pembesar VOC, Tuan-Tuan XVII untuk kemudian dipelajari. Usaha VOC untuk menumbuhkan kopi di Nusantara berbuah hasil ketika pada 1706 kopi berhasil berbuah adan bibitnya dikirimkan ke kebun raya Amsterdam untuk coba dibudidayakan. Tuan-tuan XVII kemudian memerintahkan Gubernur Jenderal saat itu, Joan van Hoorn, untuk menanam kopi di Jawa. Pada 1707, Joan van Hoorn mulai membagikan bibit kopi ke kepala bumiputera, dari Batavia hingga Cirebon.

Kopi yang dibagikan Van Hoorn ternyata tidak dapat berkembang dengan baik karena ditanam di daerah dataran rendah. Tahun 1711, dipercaya menjadi tahun ekspor pertama kopi dari tanah Jawa ke Eropa. Saat itu,

sebanyak 894 pon kopi berhasil diperdagangkan. Para pemangku VOC sangat puas. Bupati Cianjur menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan berkontribusi sebanyak 100 pon kepada VOC dari hasil perkebunan kopi. Dari sini, VOC mulai memasarkan kopi ke dunia. Wangi semerbak kopi makin tercium dibelahan dunia. Semakin terkenalnya kopi memberikan dampak yang besar terhadap pergeseran pertanian di Jawa. Tumbuhan-tumbuhan seperti beras, dan bahan pangan lainnya, mulai berubah menjadi perkebunan kopi. Hal inilah mengapa di belahan dunia Eropa ketika itu terkenal secangkir kopi yang disebut dengan Kopi Jawa.

Rasa Pahit Kopi Jawa dan Reaksi Petani

Pada 1729, muncul perintah dari VOC melalui perpanjangan

tangan penguasa bumiputera, untuk mewajibkan setiap kepala keluarga di Cirebon menanam pohon kopi berjumlah 10 pohon. Dapat dibayangkan ketika itu dengan jumlah penduduk yang mencapai ratusan kepala keluarga, berapa banyak pohon kopi yang akan tumbuh. Para penguasa bumiputera harus menggunakan cara-cara yang tidak halus untuk memaksa warganya menanam kopi, misalnya cara-cara yang dilakukan oleh Bupati Cianjur, Kampung Baru, dan Jatinegara. Jual beli kopi antara penduduk lokal dengan VOC dilakukan dengan di bawah harga pasar. Di sinilah apa yang disebut sebagai *preangerstelsel* dimulai.

Preangerstelsel adalah sistem penanaman paksa yang diinisiasi oleh VOC kepada penduduk lokal dengan memaksa penduduk lokal



Arsip *Hoge Regering*, VOC, Nomor 976 hlm 1193, Pengurangan lahan kopi di Preanger dan Batavia.



Arsip De Haan, K8, Salah satu wilayah Babakan, Tangerang, yang terdapat gudang kopi dan kebun kopi VOC tahun 1780

untuk menanam tanaman yang menguntungkan di pasar dunia dan nantinya akan diberikan upah dengan standar yang sudah diterapkan VOC. Upah ini jauh di bawah harga pasar. Kopi menjadi komoditas utama yang ditanam dalam *preangerstelsel*. Dinamakan *preangerstelsel* karena awal mula penanaman paksa ini terjadi di daerah Priangan. Ketika kopi sedang menjadi primadona di dunia, VOC dengan semena-mena menurunkan harga kopi di daerah tanamnya. Hal ini membuat para petani semakin tercekik, karena lahan mereka sudah digantikan dengan tumbuhan kopi yang diwajibkan.

Para petani di Priangan bukannya hanya diam saja melihat penindasan yang dilakukan oleh VOC. Mereka melakukan pemberontakan-pemberontakan kecil yang berupa perusakan tanaman dan kabur dari perkebunan. Dampaknya, produksi kopi menurun drastis. Jan Breman

dalam bukunya *Keuntungan dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870* bahkan menyebut kalau penurunan produksi ini baru bisa diatasi setelah enam puluh tahun proses penanaman kopi kembali. Petani-petani tersebut berhasil “mengganggu” perdagangan kopi VOC yang di saat itu sedang menjadi primadona. Penyelundupan-penyelundupan kopi yang dijual di luar jalur VOC juga dilakukan para petani sebagai bentuk pemberontakan melawan harga yang tidak pantas yang ditetapkan VOC.

Akhir Riwayat Kopi Era VOC

Perlawanan-perlawanan petani lokal terhadap VOC semakin menjadi menjelang akhir abad 18. Gudang-gudang VOC yang menjadi tempat disimpannya kopi untuk diekspor, mulai kosong dan mulai tersaingi oleh perdagangan-perdagangan kopi di bawah tanah. Intrik kopi di era VOC yang menanamkan sistem

preangerstelsel akhirnya berakhir ketika VOC mulai berangsur-angsur kepayahan mengikuti tren perdagangan dunia. Akhir abad 18, VOC mulai menemui kemundurannya. Kopi, yang ketika masa itu menjadi primadona, mulai perlahan digantikan dengan komoditas lain. Namun, warisan VOC dan pahitnya kopi masa tersebut tidak berhenti. *Preangerstelsel* kemudian nantinya di era Hindia Belanda, akan diadopsi menjadi sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel*. Sebuah sistem yang ditanam di Hindia Belanda untuk membayar hutang dan mengisi kas Belanda, hingga akhirnya memunculkan keuntungan besar bagi Belanda. Maka, di setiap seruput kopi yang bangsa Eropa dan dunia ketika itu cicipi, ada rasa pahit para petani bumiputera yang terasa.

Dharwis W.U. Yacob

MENGENAL LEBIH DEKAT

SERVICE DES ARCHIVES DE NOUVELLE CALÉDONIE: MENCARI ARSIP SUKU JAWA DI KALÉDONIA BARU

Kaledonia Baru (dalam bahasa Inggris : New Caledonia, bahasa Prancis : *Nouvelle-Calédonie*) adalah sebuah wilayah yang berstatus pendudukan Prancis. Wilayah ini terletak di Samudra Pasifik sebelah barat daya. Ibu kotanya ialah Noumea. Kaledonia Baru mengadakan referendum kemerdekaan dari Perancis pada 4 November 2018, dengan hasil 43,6% ingin merdeka dan 56,4% tidak. Sesuai perjanjian Noumea akan diadakan referendum kembali pada tahun 2020. Jika gagal akan diadakan pada tahun 2022, apabila sepertiga Kongres Kaledonia

Baru menyetujuinya.

Kaledonia Baru merupakan kepulauan seluas 18,575 km² persegi yang ditemukan oleh penjelajah James Cook pada 4 September 1774, ketika ia melakukan perjalanan keduanya di kawasan Samudera Pasifik. Ia menamakan wilayah ini Kaledonia Baru karena teringat tanah kelahirannya, Skotlandia. Di bawah pemerintahan Napoleon III, Prancis mengambil alih Kaledonia Baru secara resmi pada 24 September 1853 dan membangun Noumea yang kini menjadi ibu kota pada 25 Juni 1854.

Bermula dari aturan Koeli Ordonantie pada tahun 1880 yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja di perkebunan Belanda di Sumatera, Prancis meminta buruh untuk pertambangan nikel dan perkebunan di Kaledonia Baru, kemudian dikirimlah 170 pekerja dari Pulau Jawa dan tiba di Kaledonia Baru pada 16 Februari 1896. Perpindahan suku Jawa di Kaledonia Baru juga sama dengan Suku Jawa Suriname, tetapi kepindahan Suku Jawa di Pasifik telah terhenti sejak 1949. Suku Jawa di



Kantor *Service des Archives de Nouvelle Calédonie*



Penyimpanan arsip *Service des Archives de Nouvelle Calédonie*

Kaledonia Baru tetap menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, tetapi kini generasi mudanya sudah tak bisa berbahasa Jawa, hanya bisa berbahasa Prancis. Suku Jawa di Kaledonia Baru adalah salah satu populasi Asia tertua dan terbesar di Kaledonia Baru. Suku Jawa yang tinggal di Kaledonia Baru berjumlah sekitar 7.000 orang dari total 220.000 jumlah penduduk Kaledonia Baru.

Ada tiga gelombang kedatangan suku Jawa ke Kaledonia Baru. Gelombang pertama adalah kedatangan 170 para pekerja dari Pulau Jawa pada 1896 yang bekerja di tambang nikel. Saat kontrak mereka habis, ada yang kembali ke Jawa namun ada juga yang menetap di Kaledonia Baru. Gelombang kedua terjadi sebelum Perang Dunia II, saat Kaledonia baru sedang mengalami kekurangan tenaga kerja padahal tambang nikel dan produksi kopi sedang meningkat. Pada periode tahun 1933-1939, lebih dari 7.800 orang datang dengan kontrak selama lima tahun dan dipekerjakan di kawasan perkebunan, pertambangan serta rumah tangga. Gelombang ketiga adalah pada 1970 yang menjadi tahun terakhir kalinya kedatangan orang dari suku Jawa dengan sistem kontrak. Pada akhir 1969 hingga



Khazanah arsip audio-visual *Service des Archives de Nouvelle Calédonie*

awal 1970 lebih dari 1000 orang dari suku Jawa datang, khususnya untuk membangun jembatan Nera di Cote Ouest, jembatan di Cote Est dan menara St. Quentin di Magenta. Suku Jawa bekerja bersama dengan orang Vietnam dan Jepang yang postur tubuhnya dianggap ideal untuk masuk ke terowongan bawah tanah tambang krom. Berdasarkan data Konsulat Jenderal Republik Indonesia Noumea, orang berasal dari Suku Jawa yang masih memegang kewarganegaraan Indonesia sebanyak 355 orang. Mereka tersebar merata di seluruh pelosok Kaledonia Baru mulai dari Provinsi Sud hingga ke Provinsi Nord dan kepulauan luar yang banyak dihuni penduduk asli Kanak, keturunan orang-orang Austronesia yang tiba di

wilayah Kaledonia Baru pada 1.500 sebelum masehi.

Orang dari Suku Jawa dan keturunannya memiliki beragam jenis pekerjaan mulai dari pekerja tambang nikel, pekerja swasta, ibu rumah tangga yang bekerja paruh waktu sebagai penata laksana rumah tangga atau pengusaha restoran. Beberapa keturunan suku Jawa yang sudah menjadi warga negara Prancis ada yang menduduki jabatan penting seperti Roesmaeni Sanmohammad yang menjadi anggota parlemen dan aktif melestarikan seni tari Jawa kreasi baru serta pernah belajar tari Jawa di Padepokan Bagong Kusudihardjo, Yogyakarta. Selain itu, Corine Voisin yang sekarang menjabat sebagai Wali kota La Foa, salah satu wilayah

di Provinsi Selatan dan Mohamed Raden Kasim (alm) yang namanya diabadikan sebagai nama taman di daerah Sixeme, Noumea, oleh karena pada masanya menjadi satu-satunya orang yang pandai memainkan alat musik gitar Hawaii. Tidak ketinggalan Emmanuelle Darman yang pernah menjadi Miss Kaledonia Baru pada tahun 2005 dan setidaknya 25 orang warga keturunan Suku Jawa yang ikut serta dalam tim Kaledonia Baru dalam *Pacific Games* periode 1963-2007.

Saat perayaan seratus tahun kedatangan Suku Jawa di Kaledonia Baru pada 16 Februari 1996, sebuah batu peringatan acara ini diresmikan di distrik dari Panti Asuhan di Noumea. Banyak praktik-praktik budaya Jawa yang diadopsi oleh seluruh penduduk Kaledonia Baru. Sebagai contoh, pada kuliner yaitu bakmi telah menjadi salah satu hidangan terpopuler di Kaledonia Baru. Selain itu, ada pula beberapa kata berasal dari bahasa Jawa yaitu *cacane* dan *kakang*.



Tugu kedatangan orang dari Suku Jawa di Kaledonia Baru

Ada tiga kategori suku Jawa di Kaledonia Baru, yaitu golongan *niaouli*, *wong baleh* dan *wong jukuan*. Golongan *niaouli* itu adalah keturunan pertama suku Jawa yang lahir di Kaledonia Baru dengan orang tuanya

berasal langsung dari Jawa. Asal kata *niaouli* yaitu dulu waktu bekerja belum ada cuti, termasuk cuti melahirkan. Jadi ketika ibu melahirkan anak, tiga hari kemudian, ia harus melaksanakan tugas sebagai orang kontrak, jadi anak tersebut dibalut dengan kain batik dan ditaruh di bawah pohon niaouli saat orang tuanya bekerja. *Golongan wong baleh* artinya adalah orang-orang yang kembali (balik). Setelah kemerdekaan Indonesia, sekitar tahun 1950-an, beberapa orang dari suku Jawa menuntut pulang ke Indonesia, tetapi ternyata mereka sulit untuk hidup sehingga kembali ke Kaledonia Baru. Tercatat pada tahun 1952 dan 1954-1955 terjadi kepulangan massal orang suku Jawa dan hanya tinggal 2.000 orang yang menetap di Kaledonia Baru. Padahal pada akhir tahun 1939-1940, terdapat 20.000 orang keturunan Suku Jawa. Golongan *wong jukuan* artinya adalah bawaan keluarga atau mereka yang lahir di Jawa namun dibawa ke Kaledonia Baru oleh orang suku Jawa yang tinggal di Kaledonia Baru.



Daftar arsip nama-nama imigran suku Jawa di Kaledonia Baru



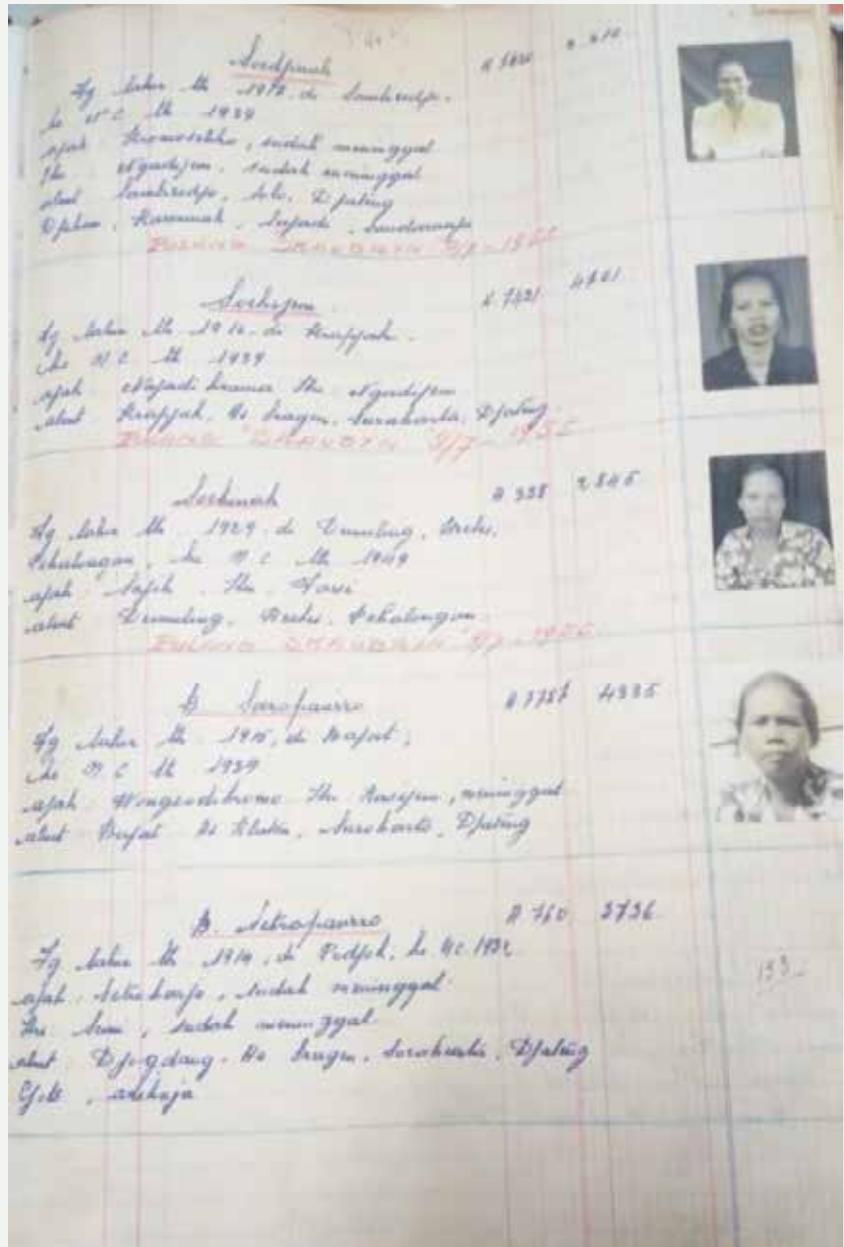
Arsip mengenai identitas fisik suku Jawa di Kaledonia Baru

Service des Archives de Nouvelle Calédonie bertanggung jawab atas pengumpulan, pelestarian, pemilahan, klasifikasi, inventaris, serta komunikasi arsip publik dan pribadi di Kaledonia Baru. Selain itu, *Service des Archives de Nouvelle Calédonie* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa arsip digunakan untuk promosi budaya dan pendidikan di Kaledonia Baru. *Service des Archives de Nouvelle Calédonie* memiliki khazanah arsip foto yang telah berkembang selama lima belas tahun terakhir. Puluhan ribu khazanah arsip foto *Service des Archives de Nouvelle Calédonie* mencakup mulai tahun 1857 hingga

MANCANEGARA

tahun 2002, dengan proporsi kuantitas foto yang sangat besar untuk periode tahun sebelum 1950. Khazanah arsip foto meliputi piring kaca, foto negatif, dan foto positif. Khazanah arsip foto disimpan aslinya serta direproduksi dalam bentuk digital dan foto positif. Selain itu, terdapat khazanah arsip film yang mencakup semua entri film lama atau film terbaru yang dikirimkan oleh individu atau sutradara film dokumenter tentang Kaledonia Baru khususnya arsip film yang direkam pada tahun 1930-an hingga 1960-an oleh individu. Terdapat pula khazanah arsip peta, terutama yang dibuat oleh Dinas Survey pada tahun 1860 dan peta-peta pulau di Kaledonia Baru. Tentunya tidak lupa juga adalah khazanah arsip tekstual berupa daftar silsilah, daftar orang-orang yang dibaptis, catatan pengadilan, daftar nama narapidana, register status sipil hukum umum (kelahiran, pernikahan, kematian), salinan digital dari register penduduk beragama Katholik dan tentunya data penduduk suku Jawa.

Service des Archives de Nouvelle Calédonie menjadi salah satu bukti bahwa suku Jawa tidak hanya tinggal di Indonesia ataupun Suriname. Suku Jawa juga tinggal di sebuah negara di Samudera Pasifik yaitu Kaledonia Baru. Penelitian mengenai suku Jawa di Kaledonia Baru juga masih sedikit. Dengan diperkenalkan mengenai khazanah arsip di Kaledonia Baru, dapat memacu kolaborasi penelitian antara Indonesia yang dihuni oleh suku Jawa dengan Kaledonia Baru yang juga dihuni oleh suku Jawa. Kolaborasi



Daftar nama-nama suku Jawa di Kaledonia Baru

penelitian Indonesia-Kaledonia Baru perlu ditingkatkan agar mampu menunjukkan bahwa sejarah mengenai orang dari suku Jawa semakin diketahui oleh dunia internasional dan akhirnya diharapkan dapat membawa nama Indonesia menjadi dikenal

oleh dunia internasional. Penelitian mengenai perkembangan suku Jawa akan meningkatkan ilmu pengetahuan terutama mengenai kebudayaan Jawa sehingga dunia internasional semakin mengetahui perkembangan kebudayaan Jawa.



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN JAWA BARAT

KIPRAH DISPUSIPDA JAWA BARAT TINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI DAERAH

“...Arsip bukan lagi sekedar catatan historis, bukan pula hanya menjalankan fungsi dukungan kesekretariatan dari suatu organisasi pemerintahan. Tetapi, justru kearsipan adalah unsur utama yang integral dalam keseluruhan upaya membangun pemerintahan modern...”

Penggalan sambutan di atas menjadi amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) era Kabinet Kerja, Syafrudin pada peringatan Hari Kearsipan ke-48 Tahun 2019 di Makassar memang sudah mulai diimplementasikan dalam berbagai kebijakan, program ataupun kegiatan oleh berbagai lembaga kearsipan di Indonesia. Tak hanya oleh lembaga kearsipan nasional dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), lembaga kearsipan daerah dan perguruan tinggi juga terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan

sehingga mampu berkontribusi dalam membangun pemerintahan yang modern. Salah satu di antaranya ialah oleh lembaga kearsipan daerah provinsi Jawa Barat (Jabar) atau yang dikenal dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusipda) Jabar.

Beralamatkan di jalan Kawalayaan Indah III nomor 4, Bandung, Dispusipda Jabar kini tengah membina 27 lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota se-Jabar. Tak hanya itu, Dispusipda pun turut membina unit kearsipan Perangkat Daerah provinsi Jabar yang fungsi kelembagaan unit kearsipannya diperkuat dalam regulasi berupa Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar. Dukungan dan komitmen pimpinan yang cukup konsisten seperti halnya alokasi anggaran untuk pengembangan kearsipan pun menjadi “vitamin” bagi

jajaran Dispusipda Jabar untuk unjuk kinerja.

Pada edisi kali ini, tim redaksi Majalah Arsip berkesempatan melaksanakan reportase sekaligus mewawancarai Kepala Dispusipda Jabar, Riadi untuk mengupas kinerja Dispusipda Jabar dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Jabar. Beberapa tahun terakhir, telah banyak program dan kegiatan yang gencar dijalankan Dispusipda agar buah kinerja penyelenggaraan kearsipan dapat dirasakan dampaknya baik oleh kalangan pemerintahan maupun masyarakat. Tak heran, hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan ANRI terhadap Dispusipda Jabar pun menunjukkan hasil yang patut diapresiasi, di mana Dispusipda Jabar memperoleh kategori nilai B dengan akumulasi nilai 89,04.

Hidupkan Program Arsip Masuk Desa untuk Bantu Akuntabilitas

DAERAH

Pengelolaan Dana Desa

Sejak disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya diperbaharui dalam PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014, desa-desa di Indonesia dituntut untuk profesional, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Menyikapi hal ini, Dispusipda Jabar memandang bahwa agar tercapainya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel, maka pengelolaan arsip yang tercipta atas penggunaan dana desa harus dikelola dengan baik, sehingga kinerja dan penggunaan atas dana desa dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, Dispusipda Jabar kembali menghidupkan Program Arsip Masuk Desa.

Jika kita menilik kembali beberapa tahun silam, Program Arsip Masuk Desa ini diinisiasi oleh ANRI. Di mana pada tahun 2009, ANRI meluncurkan Program Arsip Masuk Desa yang langsung dicanangkan Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono ketika peresmian Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa ANRI pada 31 Agustus 2009 silam. Program Arsip Masuk Desa ini menjadi sebuah upaya lembaga kearsipan untuk meningkatkan peran arsip dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat. Apalagi desa menjadi ujung tombak pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta ujung tombak pelayanan publik.

Ditemui di sela-sela kesibukannya, Riadi menjelaskan bahwa Program Arsip Masuk Desa menjadi salah satu program unggulan Dispusipda Jabar. "Saat ini kami gencarkan kembali Program Arsip Masuk



Sosialisasi Arsip Masuk Desa di Kabupaten Tasikmalaya

Desa, salah satu pertimbangannya, karena anggaran desa itu besar, kita sosialisasikan kembali bahwa pengelolaan arsip desa itu penting. Jangan sampai masa jabatan kepala desa selesai, semua administrasi dibawa. Meskipun terjadi pergantian kepala desa, program dan kinerja pemerintahan desa seharusnya dapat terdokumentasikan, tergambarkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik jika pengelolaan arsip desanya sudah berjalan baik," terang Riadi.

Dalam menjalankan programnya, Riadi dan jajaran berkoordinasi dengan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota di Jabar untuk menentukan desa mana yang terlebih dahulu dipilih untuk diberikan sosialisasi. "Karena kita juga masih terbatas orangnya, mungkin paling banyak 30 orang, maka yang diberikan sosialisasi dapat mencapai 30 desa, jika satu orang membina satu desa," jelas Riadi. Ditambahkan olehnya, pada pelaksanaan di lapangan sumber daya manusia (sdm) memberikan sosialisasi biasanya lebih dari satu orang. Setelah sosialisasi dilaksanakan, dalam kurun waktu tiga atau enam bulan kemudian Dispusipda memberikan bimbingan teknis (bimtek) kearsipan. Bimtek ini membahas hal yang lebih teknis terkait pengelolaan arsip desa dan diharapkan dapat membantu kesiapan aparatur desa

dalam mengelola arsip. Selanjutnya, Dispusipda juga akan melakukan evaluasi terhadap desa yang sudah memperoleh sosialisasi atau bimtek tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, Riadi menerangkan bahwa masih terdapat beberapa catatan, di antaranya pemerintah desa saat ini masih membutuhkan infrastruktur, termasuk gedung atau tempat khusus untuk menyimpan arsip.

Selain melakukan sosialisasi dan bimtek kearsipan terhadap aparatur desa, dalam program Arsip Masuk Desa ini pun dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan arsip keluarga. Di mana saat pelaksanaannya, Dispusipda Jabar dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota terkait menggandeng pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Gelar Mobil Layanan Masyarakat Sadar Arsip (Masdarsip)

Dalam menyosialisasikan arsip, sampai saat ini Dispusipda Jabar secara rutin mengoperasikan mobil layanan Masdarsip di berbagai tempat strategis. Lokasi rutin yang kerap didatangi mobil layanan Masdarsip yakni, pada hari Minggu pagi di jalan Buah Batu saat pelaksanaan *car free day*. Ada berbagai jenis kegiatan dan informasi



Dalam menyosialisasikan arsip, sampai saat ini Dispusipda Jabar secara rutin mengoperasikan mobil layanan Masdarsip di berbagai tempat strategis. Lokasi rutin yang kerap didatangi mobil layanan Masdarsip yakni, pada hari Minggu pagi di jalan Buah Batu saat pelaksanaan car free day.

yang disampaikan dalam operasional mobil layanan Masdarsip ini, seperti halnya pameran arsip foto, pemutaran film sejarah atau perjuangan yang bersumber dari khazanah arsip dan perbaikan arsip milik masyarakat.

Setiap kali mobil layanan Masdarsip dioperasikan, biasanya tim Dispusipda Jabar menggelar pameran foto yang jumlahnya berkisar 100 sampai dengan 200 foto. Adapun arsip foto yang dipamerkan, antara lain arsip perjuangan kemerdekaan, arsip pemerintahan pemerintahan orde lama dan orde baru serta arsip bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Sedangkan ketika pemuaran film sejarah atau perjuangan, Dispusipda biasanya menyesuaikan dengan peringatan peristiwa bersejarah pada bulan berjalan. Seperti halnya pada bulan Agustus, film bersejarah yang kerap diputar ialah berbagai hal terkait kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan untuk menambah koleksi film bersejarah yang diputar, Dispusipda Jabar kini tengah menjajaki kerja sama dengan Dinas Sejarah TNI Angkatan

Darat yang berkantor di Bandung.

Selain itu, dalam gelar mobil layanan Masdarsip Dispusipda Jabar juga menyediakan layanan perbaikan atau perawatan arsip keluarga milik masyarakat. Menurut Riadi, program perbaikan arsip keluarga ini cukup antusias disambut oleh masyarakat Jabar. Tak hanya masyarakat, Dispusipda Jabar juga memberikan layanan perbaikan atau perawatan arsip keluarga kepada pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jabar. Biasanya, tim restorasi Dispusipda Jabar mendatangi OPD dengan menggunakan mobil layanan Masdarsip untuk memperbaiki arsip keluarga milik pegawai tersebut.

Panggung Inohong

Sejak tahun 2016, Dispusipda Jabar telah membangun Panggung Inohong (Hall of Fame) di salah satu sudut kompleks perkantoran. Panggung Inohong ini diresmikan Gubernur Jabar periode 2008-2018, Ahmad Heryawan pada 27 Desember 2016. Dalam menyusun materi informasi yang akan disajikan di dalam Panggung Inohong, tim Dispusipda

Jabar melakukan penelusuran arsip para tokoh pahlawan, negarawan, olahragawan, seniman, budayawan dan cendekiawan terkemuka di Jabar. Informasi para tokoh disajikan dalam bentuk display arsip foto di sepanjang dinding ruangan dan monitor layar sentuh yang menjelaskan lebih rinci profil para tokoh “inohong” tersebut. Selain informasi para tokoh terkemuka di Jabar, di Panggung Inohong juga menyajikan ringkasan sejarah kerajaan di Jabar. Di Panggung Inohong sendiri, terdapat 350 informasi tokoh yang disajikan kepada publik, termasuk informasi Gubernur Jabar saat ini, Ridwan Kamil. Adanya Panggung Inohong ini dapat menunjukkan bahwa jika khazanah arsip dikemas secara menarik, dan modern, maka memberikan potensi bahwa arsip ke depannya menjadi tujuan wisata. “Informasi dalam arsip yang kekinian pasti akan lebih menarik dan diminati generasi muda,” papar Riadi.

Siap Selamatkan Arsip Kebijakan Gubernur dan Bina Arsip Pesantren

Tak hanya kegiatan rutin, Dispusipda Jabar pun mencoba responsif untuk bersiap menyelamatkan arsip terkait ide Gubernur Jabar periode 2018-2023, Ridwan Kamil. Menurut Riadi, kini banyak ide yang lahir dari Gubernur yang tak jarang cikal bakal ide tersebut dituangkan seperti membuat mind mapping. “Kita ingin simpan bahkan nantinya pun bisa dialihmediakan. Jika perlu kita buat satu kotak untuk arahan-arahan beliau. Satu tahun ini ide apa yang dikeluarkan oleh beliau,” jelas Riadi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Jabar.

Selain itu, Riadi juga memperoleh arahan dari Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, UU Ruzhanul Ulum untuk membantu mengarsipkan dan membina kearsipan pesantren di Jawa Barat. “Kami menyambut baik



Sejak tahun 2016, Dispusipda Jabar telah membangun Panggung Inohong (Hall of Fame) di salah satu sudut kompleks perkantoran

arahan Pak Wagub dan saya juga melihat bahwa pembangunan di wilayah Jabar itu banyak melibatkan pesantren. Tapi memang, kita belum turun ke pesantren. Dengan dukungan Pak Wagub diharapkan pesantren juga sudah mulai kita sentuh pengarsipannya. Tetapi saat ini, kendala yang dilalui yakni arsiparis kita masih sedikit dan itu berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan kearsipan kita,” terang Riadi.

Jika melihat paparan di atas, telah banyak hal yang dilakukan Dispusipda Jabar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Jabar. Bahkan masih banyak lagi berbagai kegiatan lainnya yang turut berkontribusi meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan, seperti pembinaan dan pengawasan kearsipan ke tiap OPD, akuisisi terhadap pencipta arsip yang dihapus atau digabungkan, pembinaan sdm kearsipan, restorasi dan digitalisasi terhadap khazanah arsip statis yang dikelola, pemberian bantuan mobil layanan Masdarsip dan bantuan dana pembangunan depot bagi lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota di

Jabar, peran aktif Dispusipda Jabar sebagai simpul jaringan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan kegiatan lainnya.

Meski masih diperlukan perbaikan, buah kinerja Dispusipda Jabar dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan kini sudah mulai tampak. Apalagi semenjak pengelolaan arsip di instansi pemerintah menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan reformasi birokrasi, para Kepala Daerah dan pimpinan OPD semakin tersadar akan pentingnya pengelolaan arsip. Riadi menerangkan bahwa jika dulu kabupaten/kota masih ada yang belum memiliki depot dan sarana prasarana kearsipan lainnya, sekarang sudah banyak kabupaten/kota yang mulai membangun depot. Bahkan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran untuk kearsipan minimal Rp 50.000.000,00 per tahunnya. Tak hanya itu, jika sebelumnya saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) provinsi cukup

“sepi” terhadap pertanyaan tentang kearsipan, tetapi sekarang kondisinya berbeda. Isu kearsipan sering menjadi bahan diskusi dan kerap banyak lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota dan OPD secara proaktif meminta dibina secara khusus.

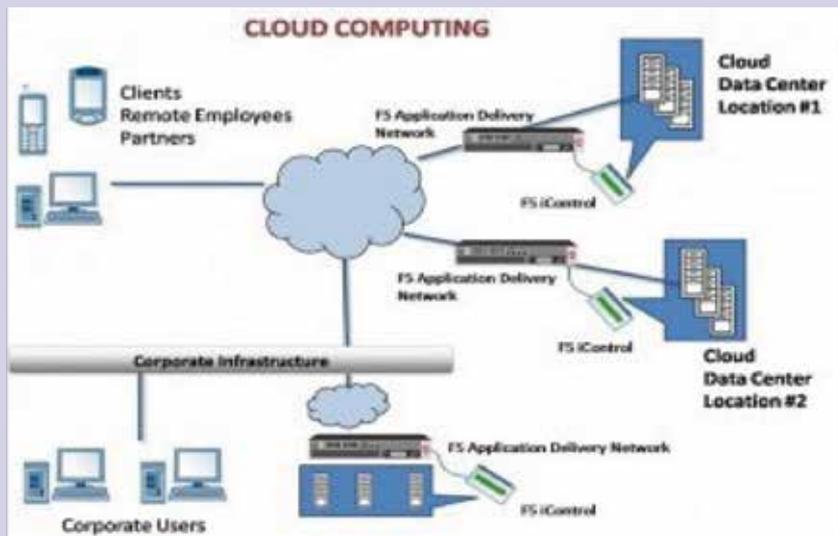
Menilik berbagai kiprah jajaran Dispusipda Jabar dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan, maka tak heran jika Dispusipda Jabar menjadi tujuan benchmark bagi lembaga kearsipan daerah provinsi lain. Berbagai program dan kegiatan berpotensi untuk diadopsi atau bahkan dimodifikasi oleh lembaga kearsipan daerah lain. Dengan demikian, diharapkan Dispusipda Jabar juga berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan nasional dan menjadi pilot project bagi lembaga kearsipan daerah lain yang sedang atau akan berbenah diri kearsipan sehingga mampu berkontribusi dalam membangun pemerintahan yang modern. (tk)

Parno Nusantara

PEMANFAATAN *CLOUD COMPUTING* BERBASIS *CLOUD STORAGE* SEBAGAI *BACK-UP* PENYIMPANAN ARSIP KELUARGA

Keberadaan arsip keluarga mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan maupun pelaksanaannya pada PP No.28 Tahun 2012 arsip keluarga tidak tertulis secara langsung tapi dapat dikategorikan sebagai arsip perseorangan. Terkait dengan tingkat kepentingannya, beberapa arsip perseorangan keluarga dapat dikategorikan sebagai arsip vital. Contohnya adalah Ijazah sekolah, Akta Jual Beli, BPKB Kendaraan dan sebagainya. Dikategorikan sebagai arsip vital karena keberadaannya tidak bisa tergantikan ketika arsip tersebut hilang maupun rusak. Misalkan ketika seseorang kehilangan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) baik karena hilang, rusak maupun terkena bencana maka SMA yang mengeluarkan ijazah tersebut hanya dapat mengeluarkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi siswa dan lulus pada sekolah tersebut, bukan merupakan arsip sebagaimana aslinya. Dengan demikian maka dibutuhkan bagaimana cara memback-up arsip-arsip tersebut sehingga apabila terjadi sesuatu pada aslinya maupun dibutuhkan akses yang cepat, back-up arsip dapat dimanfaatkan.

Terdapat dua jenis *back-up* arsip yang dapat dilakukan, yaitu secara



Skema Cloud Computing

offline maupun online. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memindai arsip tersebut ke dalam bentuk digital. Secara *offline*, arsip digitalnya disimpan pada media simpan lokal seperti CD, DVD, BD maupun disimpan pada *Personal Computer* (PC). Sedangkan secara online, arsip dalam bentuk digital tersebut dapat disimpan pada cloud computing baik secara gratis maupun berbayar.

Cloud Computing

Perkembangan teknologi mengalami perubahan yang sangat pesat sehingga mempengaruhi perkembangan media penyimpanan pada komputer dari masa ke masa.

Salah satu jenis perkembangan media penyimpanan yaitu berbasis *cloud* (awan). *Cloud computing* tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pebisnis karena memberikan banyak manfaat dalam mengefisienkan penyimpanan data. *Cloud Computing* merupakan suatu paradigma dimana informasi secara permanen tersimpan di server internet dan tersimpan secara sementara di computer pengguna seperti *desktop*, *komputer*, *tablet*, *notebook* dan lain-lain. Terdapat beberapa jenis *cloud computing* yaitu:

1. *Infrastructure As A Service* (IAAS)
2. *Platform As A Service* (PAAS)

3. Software As A Service (SAAS)

Cloud Computing biasanya tersedia sebagai layanan kepada siapa saja di internet. Salah satu sistem yang tersedia pada *cloud computing* adalah *Cloud Storage*. Terdapat varian lain pada *cloud storage* yang dikenal *Private Cloud* yang semakin populer untuk infrastruktur pribadi/*private* yang mempunyai atribut *Cloud* di atas.

Cloud Storage

Sebelum *Cloud Computing* sepopuler sekarang, layanan *Cloud Storage* lebih dikenal dengan istilah *virtual drive*, namun memasuki era *Cloud Computing* istilah tersebut lebih dikenal dengan sebutan *Cloud Storage*. *Cloud Storage* merupakan layanan penyimpanan file pada internet dimana file yang disimpan dapat dikelola dari mana saja selama penggunaannya terhubung ke *Cloud Storage* tersebut melalui internet. Konsep *Cloud Storage* sama seperti konsep *file server*, hanya saja infrastruktur media *storage* tersebut dikelola oleh *provider Cloud* dan pemanfaatannya dijadikan layanan penyimpanan file yang dapat diakses dari internet. Selama komputer yang digunakan terhubung dengan internet, seorang pengguna tidak perlu lagi menggunakan flashdisk maupun CD/DVD untuk keperluan mobilitas penyimpanan data yang disimpan. Beberapa *cloud storage* populer yang dapat digunakan untuk menyimpan

arsip keluarga sebagai berikut:

1. Dropbox

Dropbox didirikan pada Tahun 2007 oleh lulusan *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) Drew Houston dan Arash Ferdowsi dengan modal awal yang didapat dari Y Combinator. Dropbox merupakan layanan penyedia data berbasis web menggunakan sistem penyimpanan berjejaring yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan berbagi data serta berkas dengan pengguna lain di internet menggunakan sinkronisasi data.

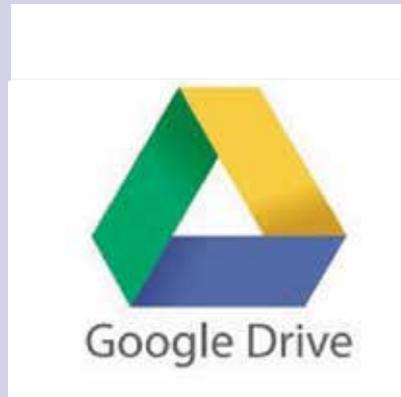
Dropbox menyediakan layanan baik gratis ataupun berbayar, masing-masing dengan keuntungan yang bervariasi. Dalam perkembangannya dikenal beberapa jenis Dropbox seperti "*Dropbox for Teams*" yang dikhususkan untuk kelompok bisnis yang membutuhkan layanan lebih. Dropbox menawarkan jumlah pengguna yang relatif besar, dengan penggunaan sistem operasi yang bervariasi mulai dari Microsoft Windows, Mac OS X, dan Linux. Selain itu tersedia juga versi untuk perangkat mobile seperti Android, Windows Phone 7, iPhone, iPad, WebOS, Blackberry dan klien yang berbasis web. Dropbox memberikan layanan gratis penyimpanan online sebesar 2 GB. Para pengguna yang menyarankan Dropbox ke orang lain bisa meningkatkan kapasitas penyimpanannya hingga 8 GB.

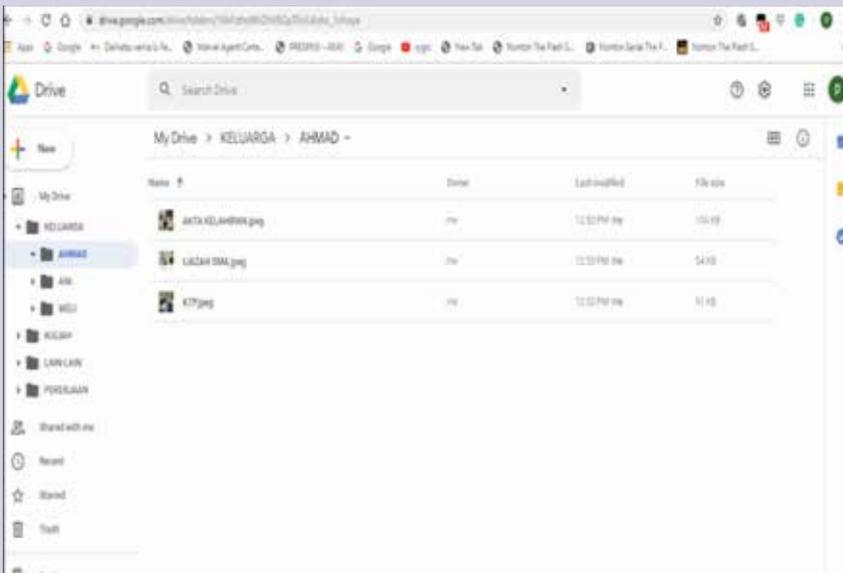
2. Google Drive

Google Drive menyediakan layanan penyimpanan berjejaring milik Google yang diluncurkan pada 24 April 2012. Layanan ini merupakan ekstensi dari Google Docs dan menggantikan URL docs.google.com dengan drive.google.com setelah diaktifkan. Dengan fitur unggulan yang sama seperti Dropbox yaitu sinkronisasi data melalui folder khusus di dalam desktop (*Desktop Sync Clients*). Fitur-fitur Google Drive dapat diintegrasikan dengan layanan Google lainnya seperti: Gmail, G+ dan Google Search. Fitur yang bisa digaris bawahi dari Google Drive adalah API's untuk para Developer yang telah terhubung dengan puluhan aplikasi pihak ketiga. Keuntungan Google Drive adalah data yang tersimpan dapat dibuka dimanapun berada sepanjang terhubung dengan jaringan internet secara gratis dengan pemakaian sampai 15 GB dan dapat ditambahkan dengan pembayaran tertentu. Untuk berbagi data dengan mudah melalui jaringan email.

3. OneDrive

Microsoft OneDrive atau lebih dikenal dengan nama OneDrive (sebelumnya SkyDrive, Windows Live SkyDrive, dan Windows Live Folders) merupakan layanan komputasi awan seperti Dropbox dan Google Drive. OneDrive memungkinkan pengguna mengunggah dan mensinkronkan berkas pada suatu penyimpanan awan dan kemudian mengaksesnya melalui web atau perangkat tertentu. Layanan ini dibuat oleh Microsoft dan merupakan bagian dari layanan daring Windows Live yang memungkinkan pengguna menyimpan berkas-berkasnya secara pribadi, membagikannya dengan orang-orang dalam kontak, atau menjadikan berkas-berkas bersifat umum. Berkas-berkas yang dibagikan untuk umum tidak memerlukan akun Microsoft untuk mengaksesnya. Microsoft OneDrive tidak hanya dikembangkan





Contoh Penataan Arsip keluarga pada *Cloud Storage*

di dalam Platform Windows dan Windows Mobile saja tetapi juga mendukung platform OS X dan iOS. One Drive memberikan layanan penyimpanan gratis 7 GB dengan fitur utama aplikasi editor web untuk file yang berupa dokumen (Word, Excel, Power Point dan OneNote).

4. OwnCloud.

OwnCloud dipelopori oleh Frank Karlitschek saat ia sedang membicarakan mengenai aplikasi bebas dan terbuka. OwnCloud merupakan suatu perusahaan yang berkantor pusat di Amerika terletak di Boston, Massachusetts dan kantor cabang di Eropa terletak di Jerman

dengan proyeknya yaitu OwnCloud project dengan slogan perusahaan Your Cloud, Your Data, Your Way!.

OwnCloud merupakan salah satu perangkat lunak berbagi berkas gratis dan bebas seperti Dropbox, menyediakan pengamanan yang baik, memiliki tata cara yang baik bagi pengguna aplikasi untuk membagi dan mengakses data yang secara terintegrasi dengan perangkat teknologi informasi dengan tujuan mengamankan, melacak, dan melaporkan penggunaan data. OwnCloud memberikan akses terhadap berkas-berkas secara universal dengan menggunakan antarmuka jaringan atau WebDAV.

Adapun proses pemasangan tidak banyak membutuhkan syarat-syarat pada sistemnya dan tidak membutuhkan izin khusus.

Untuk dapat menggunakan salah satu dari Cloud Storage yang telah diuraikan, pengguna dapat melakukan pendaftaran akun secara gratis terlebih dahulu. Setelah mendaftar dan mendapatkan notifikasi verifikasi, maka akun dapat mulai digunakan. Adapun contoh penataan arsip keluarga/perseorangan dapat dilakukan seperti terlihat pada gambar 2 dengan mengambil contoh penataan pada GoogleDrive. Arsip disusun berdasarkan Alfabetis nama orang kemudian dibuat subfolder masing-masing, misalkan AHMAD, ANI, WELI. Pada setiap sub folder tersebut kemudian diunggah file-file yang akan disimpan. Penataan lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, misalkan menambahkan sub sub folde sekolah (SD, SMP, SMA, dan seterusnya). Setelah file tersebut berhasil disimpan pada cloud storage tersebut, maka pengguna dapat mengaksesnya dimanapun selama terdapat jaringan internet. Selain melihat file, terdapat fitur untuk mengunduhnya, sehingga memudahkan pengguna untuk keperluan akses secara cepat. Sebagai antisipasi keamanan *file*, maka dianjurkan untuk mengganti *password* akun secara berkala. Dengan adanya pemanfaatan cloud storage secara maksimal baik gratis maupun berbayar ini maka *back-up* arsip keluarga dapat dilakukan secara mudah dengan meminimalisir biaya pemeliharaan.

Arih Murwati

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN SIKN DAN JIKN

Tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah untuk mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu system yang komprehensif dan terpadu, serta untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Inti semangat dari tujuan tersebut sesungguhnya adalah pelestarian dan pemanfaatan arsip bagi kegiatan administrasi dan memori kolektif bangsa.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membangun Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi SIKN ini, ANRI membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai program kearsipan untuk mendukung kebijakan pemerintah "Open Governmen", yang berorientasi pada pemberian fasilitas akses kepada masyarakat terhadap informasi kearsipan yang terbuka yang dikelola oleh lembaga kearsipan secara



Penandatanganan Komitmen Bersama oleh Kepala Pusat Sistem dan JIKN (Dra Desi Pratiwi, MIM) dengan Ketua Jurusan Studi Manajemen Informasi dan Dokumen UI (Diah Safitri, S.S, M.Si.), Program Studi Kearsipan Universitas Terbuka (Siti Samsiyah, Si.Pi, M.Hum), Masyarakat Sejarawan Indonesia (Dr. Andi Achdian, M.Si), Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (Dr. Sumardiansyah), pada acara Workshop Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018, Hotel Cosmo Amaroossa.

mudah dan cepat. Dengan adanya SIKN dan JIKN, rekonstruksi jati diri dan pengalaman bangsa di masa lalu dapat dilakukan secara intelektual dan virtual keseluruhan arsip yang tersebar keberadaan dan pengelolannya di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat atau perorangan akan dapat dengan mudah menelusuri dan melacak sosok dan saling hubungan peran di antara kelompok-kelompok masyarakat dalam membangun bangsa, yang terepresentasi dalam arsip yang dihimpun dalam SIKN dan diakses melalui JIKN.

Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional sebagai

pusat jaringan nasional melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN, secara rutin Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan melaksanakan Sosialisasi SIKN dan JIKN Bagi Masyarakat Pengguna. Maksud diselenggarakan Sosialisasi SIKN dan JIKN ini adalah: (1) Menyebarluaskan informasi penyelenggaraan SIKN dan JIKN kepada masyarakat public sebagai pengguna; (2) Mensosialisasikan aplikasi SIKN dan website JIKN. Bertujuan untuk: (1) Penyelenggaraan SIKN dan JIKN dapat tersosialisasikan ke masyarakat/publik sebagai pengguna informasi kearsipan; (2)



Workshop Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018, Hotel Cosmo Amaroossa.

Penyelenggaraan SIKN dan JIKN dapat dipahami manfaatnya oleh masyarakat/publik sebagai pengguna; dan (3) Mendapatkan masukan dari pihak masyarakat publik/pengguna untuk pengembangan aplikasi SIKN dan JIKN.

Pada tahun 2018 dilaksanakan Workshop Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dengan menghadirkan 4 orang narasumber, sebagai berikut: Program Studi Kearsipan Universitas Terbuka (Dra. Siti Samsiyah, Si. Pi, M. Hum), Masyarakat Sejarawan Indonesia (Dr. Andi Achdian, M. Si), Ketua Jurusan Vokasi Manajemen Informasi dan Dokumentasi UI (Dra. Diah Safitri, S. S, M. Si), dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (Dr. Sumardiansyah), dan dicapai kesepakatan kerjasama antara Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dengan ke 4 mitra kerja tersebut.

Bentuk kemitraan dengan masyarakat sejak tahun 2018, dilaksanakan kerjasama dengan Program Studi Manajemen Informasi dan Dokumentasi (Vokasi Kearsipan) Universitas Indonesia

untuk meningkatkan jumlah data dan informasi kearsipan di simpul jaringan se Jabodetabek, termasuk di Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai simpul jaringan telah dilaksanakan input data arsip IPPHOS (Indonesian Press Photo Service) sebanyak 1800 lembar pada tahun 2018 dan input data arsip Kempen Tahun 1951 dan 1952 sebanyak 5.092 lembar pada tahun 2019.

Kemitraan dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia untuk mempromosikan pentingnya arsip dan penggunaan arsip secara daring dalam rangka pembelajaran sejarah bagi siswa di sekolah. dilaksanakan dengan kegiatan FGD untuk bersama-sama menentukan format yang tepat dan menarik dalam pembelajaran sejarah bagi siswa di sekolah dengan sumber pembelajaran dari arsip yang bisa diakses secara cepat, mudah dan murah melalui web JIKN.go.id. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya antara lain masih miskinnya konten informasi arsip yang ada di SIKN dan JIKN.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 2 kegiatan di atas adalah

kondisi pengelolaan arsip terutama pengelolaan arsip statis yang belum optimal, misalnya belum mempunyai daftar arsip statis dan ketersediaan sumber daya manusia yang masih terbatas.

Dalam rangka untuk meningkatkan jumlah arsip dan konten arsip di SIKN dan JIKN, Pusat Sistem dan JIKN melakukan pembinaan kearsipan terutama mendorong simpul jaringan untuk secara aktif melakukan penelusuran dan akuisisi arsip lokal kedaerahan yang ada di wilayah masing-masing simpul jaringan untuk memperkaya konten arsip lokal/daerah dan terus mendorong simpul jaringan untuk secara aktif, terus menerus dan berkelanjutan melakukan input data arsip yang sifatnya terbuka ke dalam SIKN agar bisa diakses oleh masyarakat melalui web JIKN.go.id.

Agar tujuan mulia dari penyelenggaraan SIKN dan JIKN dalam mendukung open government dapat segera terwujud diperlukan peran aktif dari semua pihak, tidak saja dari lembaga kearsipan tetapi juga dari masyarakat.

RAYI DARMAGARA

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN

Peran serta masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan atau implementasi sebuah undang-undang. Dalam prespektif saat ini, pembuat undang-undang cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek hukum dan bukanlah sebagai subjek yang menentukan, sehingga perlu diberikan ruang dalam mewujudkan efektivitas dan keikutsertaan masyarakat terhadap materi hukum yang diatur. Secara teori peran serta adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan secara aktif, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “peran serta” bersinomin atau disetarakan dengan partisipasi. Di eropa istilah peran serta masyarakat lebih populer dengan *public participation*, sedangkan di amerika disebut dengan *citizen participation*,

dengan arti harafiah yang sama yaitu sebagai proses yang memberikan peluang bagi masyarakat (*citizens*) untuk mempengaruhi putusan-putusan publik (*public decisions*).

Berdasarkan pendapat Keith Davis yang dikutip oleh Santoso Sastropetro (1998) bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/fikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi dapat dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam sebuah kegiatan yang dilatarbelakangi oleh sebuah kesadaran untuk terlibat, bukan atas dasar paksaan atau alasan lain yang menafikan aspek kesukarelaan untuk terlibat. Jika dikaitkan dengan kegiatan penyelenggaraan negara,

maka partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan penyelenggaraan negara, seperti proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan.

Begitu pentingnya peran serta/partisipasi masyarakat, maka hampir dipastikan disetiap undang-undang yang dibentuk pasca reformasi tertuang materi muatan tentang peran serta masyarakat. Tak terkecuali keberadaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sejalan dengan pembentuk undang-undang memberikan bagian khusus tentang peran serta masyarakat, mulai dari Pasal 71 sampai dengan Pasal 75. Bahkan telah dimasukkan dalam asas penyelenggaraan kearsipan yaitu asas kepartisipatifan yang berarti bahwa penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang

kearsipan. Peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengembangkan penyelenggaraan kearsipan, peran serta dilaksanakan oleh perseorangan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan peran serta masyarakat diwujudkan dalam ruang lingkup pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Selain itu lembaga kearsipan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan.

Ada beberapa bentuk pengaturan peran serta masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam pengelolaan arsip, peran serta masyarakat dilaksanakan dengan cara:

a. menciptakan arsip atas kegiatan yang dapat mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak keperdataan dan hak atas kekayaan intelektual serta mendukung ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara;

b. menyimpan dan melindungi arsip perseorangan, keluarga, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan masing-masing sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam penyelamatan arsip, peran serta masyarakat dilaksanakan dengan cara:

a. menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan;

b. melaporkan kepada lembaga kearsipan apabila mengetahui terjadinya penjualan, pemusnahan, perusakan, pemalsuan, dan pengubahan arsip oleh lembaga negara tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; dan

c. melindungi dan menyelamatkan arsip dan tempat penyimpanan arsip dari bencana alam, bencana sosial, perang, sabotase, spionase, dan terorisme melalui koordinasi dengan lembaga terkait.

Dalam penggunaan arsip, peran serta masyarakat dilaksanakan melalui pembudayaan penggunaan dan pemanfaatan arsip sesuai dengan prosedur yang benar.

Peran serta masyarakat dalam penyediaan sumber daya pendukung dilaksanakan dengan cara:

a. menggalang dan/atau menyumbangkan dana untuk penyelenggaraan kearsipan;

b. melakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Secara empirik dilihat pada telah berlalunya 10 tahun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan. Perjalanan penyelenggaraan kearsipan condong hanya pada penguatan di lingkup pemerintahan (*government*) dan perusahaan (*corporate*), belum pada masyarakat (*society*). Padahal masyarakat dalam kaitannya

bagaimana menjamin hak keperdataan rakyat, maka lingkup keluarga menjadi garda penting dalam mewujudkannya.

Arah Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kearsipan

Regulasi yang selama ini ditetapkan oleh lembaga kearsipan nasional cenderung pada regulasi yang berpaku pada pemerintahan baik pusat dan daerah, dan perusahaan (BUMN dan/atau BUMD), perseorangan yang merupakan tokoh dan organisasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya kebijakan lebih ditekankan pada bagaimana kewajiban terhadap pengelolaan dan penyelamatan arsip entitas tersebut.

Patut dikembangkan pola peran serta masyarakat sebagai subjek kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan proses kemandirian dalam kearsipan. Kesadaran itu misalkan dimulai pada bagaimana pengelolaan arsip keluarga dan pembentukan komunitas kearsipan dilingkungan masing-masing. Partisipasi masyarakat dalam kearsipan menjadi hal yang sangat penting ketika diletakkan di atas keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling penting tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Namun kenyataan yang masih terlihat bahwa di setiap program kearsipan, partisipasi masyarakat belum terlihat secara keseluruhan. Keadaan masyarakat yang kurang melibatkan dirinya dalam program kearsipan dilihat dari belum adanya sistem yang memberikan ruang yang memadai atau belum tersedianya suatu *frame work* bagi proses partisipasi masyarakat terhadap dunia kearsipan.

Jika diurai sesuai dengan mekanisme dalam Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa peran serta masyarakat dilakukan dalam bidang pengelolaan arsip, penyelamatan arsip, penggunaan arsip dan penyediaan sumber daya pendukung. Telah dijabarkan pula kegiatan apa yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat dalam keempat bidang tersebut. Menariknya belum begitu jelas aturan terhadap mekanisme peran serta dalam bidang kearsipan, jika ditilik lebih jauh dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kearsipan tidak terdapat pula pengaturan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam Naskah Akademik Undang-Undang Kearsipan bahwa penyelenggaraan kearsipan tidak lepas dari peran lembaga pencipta arsip, baik lembaga pencipta dalam bentuk institusi maupun masyarakat secara kelompok atau perorangan. Sebagai bagian dari lembaga pencipta arsip, masyarakat baik secara kelompok atau perorangan dapat berperan aktif menginformasikan, mengamankan, dan atau menyerahkan arsip statis nasional kepada lembaga kearsipan nasional dan atau arsip statis daerah kepada lembaga kearsipan daerah.

Agar peran serta masyarakat dalam menginformasikan, mengamankan, dan atau menyerahkan arsip statis nasional dapat bermanfaat dan dilakukan secara teroganisir dan berkesinambungan, masyarakat dapat membentuk forum kearsipan baik yang bersifat nasional maupun daerah. Dalam membentuk forum kearsipan dapat berkonsultasi dengan lembaga kearsipan nasional atau lembaga kearsipan daerah.

Yang perlu dibangun saat ini

terkait dengan bagaimana masyarakat mengetahui bahwa terdapat ruang dalam undang-undang kearsipan untuk proses pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang kearsipan yang dilaksanakan melalui kampanye-kampanye baik dalam bentuk manual atau secara elektronik terhadap penyelenggaraan kearsipan dalam rangka pelaksanaan kehidupan masyarakat sendiri.

Optimalisasi Peran Serta Masyarakat di Bidang Kearsipan

Salah satu hal mendasar yang muncul berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan adalah mengenai seberapa jauh pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan seberapa jauh masyarakat memiliki peran di dalamnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah perlukah formalitas keterlibatan masyarakat diatur dalam peraturan? karena masyarakat biasanya masih belum memiliki kepedulian terhadap kearsipan, dan masih belum mengetahui manfaat terhadap pengelolaan arsip yang baik, sehingga lembaga kearsipan dan pegiat yang bekerja dalam bidang kearsipan memiliki tanggung jawab terhadap syiar ini.

Pada tataran praktis, peran serta masyarakat dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok atau perwakilan. Secara keberlanjutan, bentuk komunitas/kelompok dianggap lebih efektif dalam pelaksanaan peran serta masyarakat di bidang kearsipan. Menggandeng kelompok masyarakat yang telah ada seperti masyarakat sejarawan Indonesia, komunitas historia Indonesia untuk mengkampanyekan sumber sejarah yaitu dari arsip yang tersimpan merupakan langkah yang perlu

dilakukan oleh lembaga kearsipan nasional.

Yang menarik tentu pada konsep peran serta dengan menggalang dan/atau menyumbangkan dana untuk penyelenggaraan kearsipan, melakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip. Dari hal tersebut dibutuhkan proses pelaksanaan teknis terhadap ketentuan untuk menjalankannya.

Selain itu program penyadaran terhadap masyarakat demi tertibnya pelaksanaan kearsipan minimal pada lingkup keluarga dan pendidikan dini bagaimana anak-anak sekolah mengenal pengelolaan arsip yang baik memberikan kontribusi dalam pengembangan tata kelola kearsipan yang sedikit sekali menjadi perhatian sebagai objek kebijakan dari penyelenggara kearsipan nasional. Pada dasarnya masyarakat dapat menyumbangkan gagasan, membantu tenaga, memberikan kritik yang membangun, memberikan motivasi, menyumbangkan keahlian, serta memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kearsipan.

Partisipasi masyarakat tidak akan muncul dengan sendirinya. Tidak sedikit di antara masyarakat yang masih berpandangan bahwa arsip sebatas urusan pemerintah. Tentunya diperlukan program yang memberikan hubungan antara pemangku kebijakan di bidang kearsipan dengan masyarakat sehingga terbuka ruang partisipasi dan berdampak positif terhadap perspektif masyarakat pada bidang kearsipan.

Farhah Faridah

IBU GURU ROKAYAH

Muduk ke kampung halaman bagiku adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dan diabaikan begitu saja. Ada Emak dan Bapak yang sudah renta dan sakit-sakitan, sekaligus mengunjungi sanak saudara tempat tumpuan dan harapanku menitipkan Emak dan Bapak. Sebagai anak tunggal dan tinggal jauh dari desa tempatku dilahirkan, secara berkala setidaknya dua kali setahun aku mengunjungi tempat masa kanak-kanakku.

Desa Haurkolot, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, adalah desa di salah satu sudut Propinsi Jawa Barat dekat Kabupaten Subang. Karena dekat dengan Subang inilah, maka hampir semua penduduk berbahasa sunda. Aku hanya bisa berbahasa sunda hingga aku menginjak sekolah dasar dan diwajibkan berbahasa Indonesia. Saat itu sekolah di Desa Haurkolot masih sangat terbatas, hanya ada satu sekolah dasar negeri, satu sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Haurgeulis dan belum ada sekolah menengah atas di Indramayu.

Sebagian besar penduduk desa adalah petani seperti Emak dan Bapak juga sebagian memilih menjadi kaum urban dan tinggal di kota-kota besar. Saat aku kanak-kanak, aku ingat hampir sebagian penduduk Desa Haurkolot buta huruf termasuk orang tuaku. Bagi mereka, bekerja di sawah lebih penting dibanding sekolah. Bapak tidak menyuruhku sekolah hingga Emak diajak tetangga

yang hendak mendaftarkan anaknya. Aku ikut Emak ke sekolah saat hendak menggembala kambing secara tiba-tiba dan hanya beralaskan sandal jepit.

“Mak, uing mau didaftarkan sekolah?” tanyaku berusaha menyamai langkah Emak yang sangat semangat.

“Muhun. Biar kamu pintar dan bisa baca. Biar gak dibohongi orang!” jawab Emak dengan langkahnya yang tetap semangat.

“Kalau Bapak marah gimana, Mak?” tanyaku khawatir dan tiba-tiba terbayang wajah Bapak.

“Soal Bapak biar itu Emak yang ngurus. Sekarang ikut antri kayak yang lain!”

Aku menurut dan antri bersama Emak juga dengan calon teman-teman baruku hingga mendapat giliran berhadapan dengan seorang wanita yang bertugas melayani pendaftaran.

“Siapa Namanya?” tanya wanita itu. Aku berpandang-pandangan dengan Emak tak percaya diri. Akhirnya komunikasi kami menggunakan Bahasa Sunda dan Emak ataupun aku bisa menjawabnya dengan sangat baik.

“Tempat dan tanggal lahirnya dimana dan berapa?” tanyanya kesekian kali. Aku kembali berpandang-pandangan dengan Emak. Emak sepertinya berpikir. Berpikir bukan tidak mengerti pertanyaan, karena pertanyaan ditanyakan dalam bahasa sunda. Emak tidak tahu tanggal

lahirku karena memang tidak pernah dicatat atau didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Kami tidak mempunyai akta kelahiran saat itu.

“Lahirnya waktu bulan mulud, kira-kira tengah tahun dan kira-kira tujuh atau delapan tahun lalu.” Emak mengingat-ingat saat memberikan jawaban.

Wanita di depanku berpikir sejenak dan bertanya, “Ibu punya akta kelahiran nak Ajum?” tanyanya sopan.

“Henteu. Henteu aya dan henteu ngarti.” Jawab Emak bingung.

Dia tersenyum kepada Emak dan kepadaku. “Baiklah. Saya akan ciptakan tempat dan tanggal kelahiran nak Ajum sesuai keterangan yang diberikan Emak tadi.” Dia berpikir dan menuliskan sesuatu di buku. “Nama lengkap, Ajum. Tempat dan tanggal lahir, Haurgeulis, 12 Juni 1973.” Dia tersenyum tulus. Senyuman yang mampu menghilangkan rasa takutku. Senyuman yang sangat memorable sepanjang hidupku. Senyuman yang mengiringi awal perjalananku mendobrak tradisi di desaku. “Mulai Senin, masuk sekolah sebelum pukul 07.00 harus sudah di sekolah. Kelasnya yang itu!” Jempol tangannya menunjuk dengan sopan suatu ruang kelas. Akupun pulang bersama Emak. “Belajar yang rajin, biar jadi orang pintar dan berhasil sukses!” pesannya masih terngiang sampai saat ini sebelum aku pulang.

Kejadian itu tahun 1980 saat aku mulai masuk sekolah dasar. Sudah 39 tahun yang lalu. Wanita itu pula

CERITA KITA

yang mengantar Emak dan aku membuat akta kelahiran saat aku akan kuliah. Wanita itu tidak pernah putus memotivasi dan membantuku meraih harapan dan mengantarku menjadi sarjana pertama di desaku. Bukan hanya sarjana pertama saja tetapi juga doktor pertama di desaku. Aku menghela nafas dan mengusap air mata yang tiba-tiba menetes di pipi. Wanita itu adalah guru sekolah dasarku, yang mengajarkan aku membaca, menulis dan berhitung. Ibu Guru Rokayah dan Emak adalah dua Kartini kebanggaanku. Suksesku menyelesaikan sekolah ke jenjang tertinggi adalah karena jasa mereka. Emak sangat pandai menyisihkan uang untuk biayaku dan Ibu Guru Rokayah pandai menyimpan arsip pribadiku. Arsip pribadi yang sangat vital bagi keberlanjutan jenjang sekolahku. Ibu Guru Rokayah bukanlah arsiparis seperti staf tata usahaku, tapi Ibu Guru Rokayah sudah melakukan pengarsipan dokumen pribadiku karena instingnya yang tajam. Ibu Guru Rokayah, seorang guru sekolah dasar yang berpikir visioner bagiku.

Ibu Guru Rokayah selalu bangga padaku yang selalu menjadi nomor satu di sekolah dan akhirnya meraih nilai ujian nasional tertinggi sekecamatan. Ibu Guru Rokayah yang mengantarku mendaftar di SMP kecamatan dan menyimpan arsip sekolah dasarku di sekolah. Ibu Guru Rokayah paham dan mengerti keadaan orang tuaku yang tidak pernah mengenyam sekolah. Setamat SMP, aku diantarnya ke Cirebon untuk mendaftar di salah satu SMA negeri favorit saat itu. Aku berhasil diterima dan menyelesaikan SMA dengan nilai baik. Saat aku hendak merantau ke kota dimana aku diterima kuliah, Ibu Guru Rokayah menyerahkan seluruh arsip pribadiku dari akte kelahiran, KTP, ijazah SD hingga SMA dalam suatu map dengan sangat rapih dan kronologis.

“Simpanlah dokumen-dokumen ini dengan baik dan hati-hati. Jagalah, sebagaimana ibu telah menjaganya

hingga waktunya tepat diserahkan kepadamu. Capailah cita-citamu, jadilah orang yang bermanfaat dan jangan lupakan tempat kelahiranmu. Semoga ibu panjang umur dan melihat kesuksesanmu.” Aku mencium tangannya pamit ke kota lain dan mulai kuliah.

Aku berhasil melanjutkan sekolah dan mendapat beasiswa hingga S3 dan menjadi salah satu pimpinan di instansi tempatku bekerja. Dua staf tata usahaku adalah arsiparis masing-masing arsiparis ahli dan arsiparis terampil. Aku sering melihat mereka melakukan penataan arsip dengan rapih. Aku juga selalu menyetujui mereka saat mengajukan pengembangan SDM lewat diklat/ pelatihan kearsipan. Dari merekalah aku mengerti bahwa pada prinsipnya arsip itu mengalir, dari mulai diciptakan kemudian digunakan dan dipelihara hingga disusutkan menjadi musnah atau permanen. Melihat mereka dan kegiatan kearsipannya, mengingatkanku pada Ibu Guru Rokayah. Ibu Guru Rokayah telah melakukan pengarsipan dokumenku dengan sangat baik dan dititipkannya di filling cabinet sekolah.

Aku menghela nafas. Aku teringat pesannya untuk tidak melupakan tempat kelahiranku dan menjadi orang yang bermanfaat. Karena itu pulalah, aku berdiskusi dan mempresentasikan rencanaku bersama Ibu Guru Rokayah yang telah pensiun di depan kepala sekolah SD tempatku sekolah dulu. Aku menyisihkan penghasilanku untuk program ini secara bertahap. Program ini bukan hanya untuk sekolah tempat Ibu Guru Rokayah mengajar dulu, tetapi juga untuk Masyarakat Desa Haurkolot, Haurgeulis, tempat kelahiranku. Aku meminta dua arsiparis yang menjadi stafku mensosialisasikan dan memberikan pelatihan kearsipan di sekolah dasar dan bale desa. Pelaksanaannya terbagi menjadi dua tahap yaitu guru dan pegawai tata usaha sekolah di hari pertama. Selanjutnya di hari kedua untuk para orang tua murid, karena

terdorong dan teringat bagaimana Ibu Guru Rokayah menyelamatkan arsipku yang autentik, terpercaya dan utuh dapat termanfaatkan dengan baik.

Di hari terakhir, kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan di Bale Desa Haurkolot, Haurgeulis. Aku ingin masyarakat desa mulai memahami pentingnya arsip dan bagaimana cara menyimpannya dengan baik, dimulai dari arsip pribadi. Bagaimanapun, kehidupan seseorang terekam dalam arsip mulai lahir hingga meninggal dunia.

Sosialisasi dan Pelatihan Kearsipan dengan tema “Peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan” di sekolah dan bale desa terlaksana dengan baik. Tibalah saatnya aku harus kembali ke kota dan pamit pada orang tuaku, guru-guru, perangkat desa dan Ibu Guru Rokayah. Ibu Guru Rokayahlah yang menginspirasi melakukan kegiatan kearsipan ini. Aku sangat senang mendengar pihak sekolah dan perangkat desa tertarik dan akan memprogramkan kearsipan dengan mulai menyiapkan sarana prasarana kearsipan dan secara bertahap melakukan penataan sesuai kaidah kearsipan.

“Terima kasih, nak Ajum. Kamu memberikan manfaat di tempat kelahiranmu. Kembalilah, tengoklah hasilnya. Terus bantu mereka!” Ibu Guru Rokayah melepaskanku pergi.

“Inshaallah kulakukan sebisaku.” Kataku dalam hati dan bertekad. Semangat!!

====&&&&====

Uing = saya

Muhun = Iya

Henteu = Tidak

Aya = Ada

PENYERAHAN ARSIP STATIS PRESIDEN SOEHARTO OLEH PIHAK KELUARGA KE ANRI

Jakarta, (18/7) – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima tambahan khazanah arsip statis tentang Presiden Soeharto yang diserahkan oleh pihak keluarga Presiden Soeharto.

Arsip tersebut diserahkan oleh Ibu Siti Hardiyanti Rukmana yang akrab disapa Mbak Tutut kepada Plt. Kepala ANRI, Sumrahyadi di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, gedung C, lantai 2 ANRI.

Khazanah Arsip yang diserahkan terdiri dari 19 roll microfilm yang berisi pidato Presiden Soeharto berikut dengan daftarnya, 10 roll microfilm pidato Ibu Tien Soeharto beserta daftar dan naskah pidatonya, 10 roll microfilm kumpulan risalah sidang kabinet periode tahun 1967 – 1998 dan proklamasi integrasi Balibo (yang mendeskripsikan tekad rakyat Timor Timur untuk bersatu dengan Indonesia) tahun 1976 beserta daftarnya, satu album foto yang terdiri dari 91 lembar foto yang merekam kegiatan Presiden Soeharto berikut compact disc-nya. Selain menyerahkan arsip ke ANRI, pihak keluarga pun meminjamkan satu unit alat baca microfilm yaitu microreader kepada ANRI.

Sumrahyadi menyampaikan bahwa khazanah arsip yang diserahkan pihak keluarga Presiden Soeharto dapat menjadi bagian dari arsip kepresidenan. Di mana ANRI dalam beberapa tahun terakhir sedang gencar melaksanakan program penyelamatan arsip kepresidenan. “ANRI mengucapkan terima kasih atas penyerahan arsip ini. Semoga arsip tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat luas,” jelas Sumrahyadi. Arsip kepresidenan nantinya dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk mengenal dan mengetahui sosok dan kebijakan para Presiden Indonesia dari masa ke masa.

Sementara itu, Mbak Tutut menyampaikan bahwa bangsa yang



Arsip Presiden Soeharto diserahkan oleh Ibu Siti Hardiyanti Rukmana yang akrab disapa Mbak Tutut kepada Plt. Kepala ANRI, Sumrahyadi di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, gedung C, lantai 2 Arsip Nasional Republik Indonesia.

mengelola jejak langkah peninggalan peradabannya cenderung menjadi bangsa besar, serta unggul dibandingkan bangsa lain. “Sejumlah dokumen Bapak (Presiden Soeharto), yang telah kami serahkan ke Negara setidaknya dapat menjadi bagian penting dari sejarah. Mudah-mudahan dokumen itu bisa menjadi salah satu acuan masyarakat dalam menghadapi realitas sosial budaya yang kompleks seperti saat ini,” terang Mbak Tutut. Pada kesempatan yang sama, Mbak Tutut juga turut mengajak masyarakat, khususnya generasi muda agar dapat mengambil unsur positif dari sejarah masa lalu. Merajut kembali identitas kebangsaan yang luhur dengan basis kebangsaan multikultur.

Penyerahan arsip statis oleh pihak keluarga Presiden Soeharto juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 88 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip tersebut diselamatkan dan dilestarikan oleh ANRI dan nantinya menjadi identitas

dan jati diri, serta memori kolektif bangsa. Arsip ini pun menjadi aset nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai informasi, sampai saat ini telah banyak arsip yang berkaitan dengan peristiwa penting masa pemerintahan Presiden Soeharto yang sudah bisa diakses oleh masyarakat di Ruang Baca ANRI. Terdapat beberapa jenis arsip yang sudah bisa diakses yang memiliki informasi tentang Presiden Soeharto, yaitu arsip tekstual, arsip foto, arsip film dan arsip video. Arsip tekstual yang terkait Presiden Soeharto berjumlah 383 nomor, arsip foto berjumlah 633 nomor serta arsip film dan video berjumlah 225 nomor. Adapun untuk mengakses arsip tersebut, masyarakat dapat menggunakan sarana temu balik arsip berupa guide Arsip Presiden ke-2 RI: Soeharto yang tersedia di Ruang Baca ANRI. •

SOFT LAUNCHING ARSIP FOTO GUS DUR



FOTO: DOK. ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Soft Launching Arsip Foto KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Acara soft launching dilaksanakan di Gedung ANRI (24/07).

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Soft Launching Arsip Foto KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Acara soft launching dilaksanakan di Gedung ANRI, Ampera Raya Jakarta, 24 Juli 2019. Pada kesempatan ini, hadir istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid. Acara Soft Launching Arsip Foto KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dibuka oleh Plt. Kepala ANRI, M. Taufik.

Dalam sambutannya M. Taufik menyampaikan konsep terkait dimensi kearsipan. "Arsip itu secara teori dan konsep ada tiga dimensi, yang pertama adalah dimensi masa lalu. Seorang Gus Dur punya masa lalu. Dibalik masa lalu, masa kini, yaitu arsip foto itu bisa berbunyi, ada korelasi tidak dengan masa kini. Dimensi ketiga adalah future (masa depan), visioner yang harus dipelajari dari seorang Gus Dur", jelas M. Taufik.

Lebih lanjut M. Taufik menambahkan bahwa Gus Dur yang dikenal dengan slogan "Gitu, Aja Koq Repot" memiliki peranan yang sangat penting dalam perjalanan proses demokrasi di Indonesia. Diharapkan dengan adanya Daftar Arsip Foto KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dapat

menjadi pembelajaran berharga bagi generasi mendatang.

M. Taufik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sinta Nuriyah Wahid yang telah hadir pada acara soft launching. "Atas nama lembaga ini dan komunitas kearsipan, Ibu sudah dua kali ke sini (ANRI), menunjukkan komitmen Ibu terhadap peran serta di negeri ini melalui arsip", tutur M. Taufik.

Sementara itu, Sinta Nuriyah Wahid sangat mengapresiasi atas terselenggaranya acara soft launching tersebut. "Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah melakukan Soft Launching Arsip Foto KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) semasa beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat. Tugas ini memang sangat-sangat berat, karena harus dilaksanakan tidak dalam waktu singkat tetapi dalam waktu yang lama dengan segala kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi", tutur perempuan yang saat ini masih terus memperjuangkan hak-hak perempuan.

Menurut Sinta Nuriyah Wahid, foto adalah barang mati, yang tidak

bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan semua narasi yang informatif agar foto itu bisa menjadi hidup dan bercerita kepada orang banyak tentang apa yang telah terjadi dalam foto itu, kapan terjadinya, ada dimana dan apa saja yang dibicarakan dalam foto itu. "Apakah foto itu bercerita dan berbicara tentang ide-ide yang bagus, tentang masalah-masalah kenegaraan atau segala sesuatu tentang kemanusiaan, itu semua bisa diketahui kalau ada pengarsipan yang baik," tutur Sinta Nuriyah Wahid", jelasnya. Sinta menambahkan dengan adanya pengarsipan yang baik hal itu akan menjadi bahan penelitian, pelajaran, atau diambil ide-ide cemerlang dari sebuah foto. "manfaatnya tidak hanya sekarang, tetapi untuk generasi penerus yang akan datang", tambahnya.

Daftar Arsip Statis Foto KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Tahun 1999 merupakan salah satu sarana bantu temu balik arsip statis foto Gus Dur yang tersimpan di ANRI. Daftar arsip ini terdiri atas Gambaran Umum, Uraian Informasi, dan lampiran yang memuat indeks

(nama, masalah, tempat) dan daftar singkatan. Pengaturan informasi arsip dalam Daftar Arsip Statis ini disusun berdasarkan urutan kronologis dengan mengacu pada nomor album foto yang diserahkan oleh pihak keluarga Gus Dur. Daftar Arsip Statis ini memuat 2.350 foto master (foto positif).

Daftar Arsip Statis Foto KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berjumlah 26 album foto, dengan rincian sebagai berikut: series Pelantikan Kabinet Persatuan Nasional diantaranya pelantikan Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Kabinet, yakni nomor arsip dari 0001 s/d 0245. Series Kunjungan Tamu Negara diantaranya Tamu dari Dalam Negeri dan Luar Negeri, yakni nomor arsip dari 0246 s/d 0402. Series Kunjungan Kerja Presiden diantaranya Dalam Negeri dan Luar Negeri, yakni nomor arsip dari 0403 s/d 2.233. Series Acara Keluarga diantaranya Acara Keagamaan dan Acara Ulang Tahun, yakni nomor arsip dari 2.234 s/d 2.350.

Khazanah arsip foto Gus Dur yang tersimpan di Arsip Nasional RI (ANRI) merupakan hasil akuisisi/ penyelamatan arsip dari pihak keluarga Gus Dur yang diwakili oleh istri dari Gus Dur yaitu Ibu Hj. Sinta Nuriyah Wahid. Beliau menyerahkan secara langsung arsip-arsip Gus Dur kepada Kepala ANRI, Mustari Irawan, pada 2 Agustus 2017. Arsip-arsip yang diserahkan sebanyak 180 album foto dengan jumlah 14.116 lembar, meliputi arsip foto berwarna, kondisi baik dan beridentitas.

Sebagian besar arsip foto Gus Dur merupakan foto-foto peristiwa atau kegiatan politik yang meliputi pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji sebagai Presiden keempat RI, foto hasil sidang umum

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), foto mengenai kunjungan kerja kepresidenan dalam dan luar negeri dan foto acara keagamaan. Selain itu, terdapat pula foto koleksi keluarga yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai dengan 2003.

Dr.(H.C.) K. H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, pria kelahiran kota Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dan wafat di Jakarta, 30 Desember 2009 pada usia 69 tahun. Pengalaman organisasi beliau adalah mantan ketua Tanfidziyah (Badan Eksekutif) Nahdlatul Ulama (NU) dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gus Dur dikenal sebagai sosok yang unik karena dalam dirinya melekat berbagai predikat, baik sebagai pemimpin organisasi massa terbesar, pejuang demokrasi, tokoh intelektual papan atas, tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh pluralisme, maupun sebagai tokoh agama (Kiai).

Dr.(H.C.) K. H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, pria kelahiran kota Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dan

wafat di Jakarta, 30 Desember 2009 pada usia 69 tahun. Pengalaman organisasi beliau adalah mantan ketua Tanfidziyah (Badan Eksekutif) Nahdlatul Ulama (NU) dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gus Dur dikenal sebagai sosok yang unik karena dalam dirinya melekat berbagai predikat, baik sebagai pemimpin organisasi massa terbesar, pejuang demokrasi, tokoh intelektual papan atas, tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh pluralisme, maupun sebagai tokoh agama (Kiai).

Gus Dur adalah seorang tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat yaitu periode 1999 hingga 2001, yaitu Presiden yang menggantikan Presiden B.J. Habibie. Gus Dur dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu tahun 1999. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, Gus Dur dibantu oleh para Menteri yang tergabung dalam Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. (is)



FOTO: DOK. ANRI

PAMERAN ARSIP DI KEMENTERIAN KESEHATAN



Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi mewakili Kepala ANRI menjadi pembicara dalam Pameran Arsip Kementerian Kesehatan RI. Pameran Arsip yang bertema Inovasi Unggulan Pelayanan Kesehatan dalam Arsip dibuka oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek berlangsung di loby gedung Prof. Dr. Sujudi Kementerian Kesehatan RI. Jakarta (13/8).

Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi mewakili Kepala ANRI menjadi pembicara dalam Pameran Arsip Kementerian Kesehatan RI. Pameran Arsip yang bertema Inovasi Unggulan Pelayanan Kesehatan dalam Arsip dibuka oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek berlangsung di loby gedung Prof. Dr. Sujudi Kementerian Kesehatan RI. Jakarta (13/8).

Sumrahyadi dalam sambutannya mengatakan bahwa Layanan Kesehatan yang dilakukan Kementerian Kesehatan dari awal sampai sekarang tentunya mempunyai nilai historis yang penting yang bisa dipelajari masyarakat dan generasi yang akan datang.

Sumrahyadi juga memaparkan bahwa hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2016, Kementerian Kesehatan mendapatkan kategori “Cukup” dengan nilai 67,25 dan menduduki per-

ingkat X dari seluruh kementerian. Tahun 2018 menjadi puncak prestasi Kementerian Kesehatan di bidang kearsipan yaitu hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI, Kementerian Kesehatan mendapatkan peringkat I kategori “Sangat Baik” dengan nilai 97,86.

Untuk mengatasi berbagai problem kesehatan, menurut Menteri Kesehatan Nila Moeloek, kita perlu belajar dari rekam jejak pembangunan kesehatan masa lalu yang tersimpan dalam bentuk arsip. Langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani berbagai problem kesehatan tersebut, bagaimana perkembangan selanjutnya dan catatan apa yang perlu dipelajari untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

“Disinilah kita membutuhkan arsip, terutama arsip pembangunan kesehatan. Melalui arsip kita bisa be-

lajar untuk memutuskan sebuah kebijakan,” kata Menkes.

Terkait pameran arsip, menurut Menkes, arsip baik dalam bentuk foto, rekaman video atau dalam bentuk lain tidak hanya sebagai catatan historis, tetapi juga digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat teknis dan strategis di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan public yang berkualitas.

“Saya berharap pameran arsip ini dapat juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit vertical kemenkes,” tandas Menkes.

Pameran arsip kesehatan yang digelar dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-74 itu sendiri akan berlangsung 13-15 Agustus 2019. (Inh)

MERIAHKAN HUT RI KE-74, ANRI GELAR PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN NASIONAL TAHUN 2019



FOTO: DOK. ANRI

ANRI melalui Direktorat Sumber Daya Manusia dan Sertifikasi Kearsipan selenggarakan Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2019. (17/8)

Jakarta, 17 Agustus 2019 - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Direktorat Sumber Daya Manusia dan Sertifikasi Kearsipan selenggarakan Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2019. Rangkaian acara berlangsung sejak tanggal 15-18 Agustus 2019 dan dibuka langsung oleh Plt. Kepala ANRI, M. Taufik.

Acara Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional bertujuan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan yang profesional, unggul dan berkompeten. Kegiatan ini digelar bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Ke-74 Republik Indonesia dengan tema SDM Unggul Indonesia Maju.

Plt. Kepala ANRI menyampaikan bahwa di era revolusi industri 4.0, arsiparis memiliki tantangan dalam pengelolaan arsip berbasis TIK. Arsiparis dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan profesional. Lebih lanjut, M. Taufik menambahkan bahwa semua peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan arsiparis teladan terbaik yang dapat menjadi agen perubahan. "Saya berharap bahwa arsiparis teladan ini menjadi agen perubahan", ungkapnya.

M. Taufik juga mengapresiasi kepada para pemenang yang telah menjadi juara. "Selamat kepada para teladan nasional yang sudah terpilih", pujiannya dalam sambutan.

Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2019 dilakukan melalui proses seleksi pada babak penyisihan tanggal 15 Agustus 2019 dan babak final pada tanggal 17 Agustus 2019 yang diikuti oleh 21 (dua puluh satu) Arsiparis Kategori Keterampilan

dan 28 (dua puluh delapan) Arsiparis Kategori Keahlian.

Pada babak penyisihan telah dilakukan penilaian aspek portofolio, kognitif, dan perilaku kerja, meliputi penilaian portofolio, ujian tertulis, penilaian laporan pelaksanaan pekerjaan kearsipan bagi Arsiparis Kategori Keterampilan dan penilaian makalah bagi Arsiparis Kategori Keahlian, penilaian video, presentasi dan wawancara serta Focus Group Discussion (FGD).

Melalui Sidang Pleno Dewan Juri, telah ditetapkan 10 (sepuluh) Arsiparis terbaik sesuai perolehan nilai tertinggi dan selanjutnya ditetapkan 6 (enam) finalis dari masing masing kategori (keterampilan dan keahlian).

Selanjutnya pada babak final telah dilakukan penilaian terhadap finalis melalui presentasi dan wawancara laporan pelaksanaan pekerjaan kearsipan bagi Arsiparis Kategori Keterampilan dan penilaian presentasi makalah bagi Arsiparis Kategori Keahlian oleh Dewan Juri berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 284 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional.

Sementara itu Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Andi Kasman menjelaskan rangkaian proses Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2019.

"Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2019 dilakukan melalui proses seleksi pada babak penyisihan tanggal 15 Agustus 2019 dan babak final pada tanggal 17 Agustus

2019 yang diikuti oleh 21 (dua puluh satu) Arsiparis Kategori Keterampilan dan 28 (dua puluh delapan) Arsiparis Kategori Keahlian", jelasnya.

Andi Kasman menambahkan bahwa pada babak penyisihan telah dilakukan penilaian aspek portofolio, kognitif, dan perilaku kerja, meliputi penilaian portofolio, ujian tertulis, penilaian laporan pelaksanaan pekerjaan kearsipan bagi Arsiparis Kategori Keterampilan dan penilaian makalah bagi Arsiparis Kategori Keahlian, penilaian video, presentasi dan wawancara serta Focus Group Discussion (FGD).

"Maka melalui Sidang Pleno Dewan Juri, telah ditetapkan 10 (sepuluh) Arsiparis terbaik sesuai perolehan nilai tertinggi dan selanjutnya ditetapkan 6 (enam) finalis dari masing masing kategori (keterampilan dan keahlian)", terangnya.

Selanjutnya pada babak final telah dilakukan penilaian terhadap finalis melalui presentasi dan wawancara laporan pelaksanaan pekerjaan kearsipan bagi Arsiparis Kategori Keterampilan dan penilaian presentasi makalah bagi Arsiparis Kategori Keahlian oleh Dewan Juri berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 284 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional.

Berikut adalah pemenang Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2019 Tingkat Terampil : Juara I, Evriyani dari Kementerian Kesehatan, Juara II Wise Wineka berasal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Juara III, Alfu Mahar Syarofi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sedangkan untuk Arsiparis Kategori Keahlian : Juara I, Herman Setyawan dari kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Juara II diraih oleh Eko Wahyudi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Juara III diperoleh Ferry Tri Mudah Riyadi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (is)

PEMBUKAAN PAMERAN BERSAMA MUSEUM DI DPR RI



FOTO: M.DULLAH

Kegiatan pameran di buka secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Politik , Hukum dan Ham, Fadli Zon.

Plt Kepala ANRI Muhamad Taufik menghadiri acara pembukaan pameran bersama museum DPR RI 2019 , Pameran museum tersebut dengan mengangkat tema “ Museum Untuk Kemajuan Informasi dan Peradaban Bangsa”, Kegiatan pameran yang di buka secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Politik , Hukum dan Ham, Fadli Zon.

Kegiatan pameran yang di selenggarakan oleh DPR RI di ikuti oleh 19 Partisipan yang terdiri dari , Museum, Perpustakaan, Balai Konservasi. Pameran tersebut di selenggarakan dalam rangka menyiratkan sebuah pesan bahwa museum adalah sebuah perawat dan sumber informasi berupa memori kolektif peradaban suatu bangsa.

Pada kesempatan yang sama Plt Kepala ANRI di undang sebagai Keynote Speech dengan mengangkat tema Konvergensi Arsip , Museum dan Perpustakaan di Era Teknologi 4.0 , dan kegiatan seminar tersebut bertempat di ruang Serbaguna Abdul Muis Gedung Nusantara Kompleks MPR/DPR/DPD Jakarta. (md)

ANRI, KEMENSETNEG, DAN TMII GELAR PAMERAN ARSIP NUSANTARA : “MERAJUT KEBERAGAMAN MENUJU INDONESIA MAJU

Bangsa Indonesia terbentuk dari beragam suku bangsa, agama, dan bahasa yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Dinamika interaksi antar kebudayaan, dan pertemuan dengan kebudayaan luar menambah ragam jenis kebudayaan yang tetap memiliki karakter keindonesiaan. Keberagaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Ia merupakan satu kekuatan yang dilahirkan melalui jalinan sejarah yang panjang. Keberagaman yang dirajut inilah kemudian mampu mendorong komitmen untuk bersatu menjadi negara maju. Indonesia maju.

Memaknai HUT ke-74 Republik Indonesia, rekam jejak keberagaman budaya dalam arsip ditampilkan dalam “Pameran Arsip Nusantara : Merajut Keberagaman Menuju Indonesia Maju”. Perhelatan ini merupakan kerja bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Balai Panjang, Museum Indonesia, TMII, 24 s.d 31 Agustus 2019. “Ini suatu tema yang luar biasa, dalam rangka mengingatkan kita untuk menjaga keutuhan NKRI”, tutur Plh. Direktur Penelitian, Pengembangan, dan Budaya TMII, Sigit Gunarjo

Lebih lanjut Sigit menambahkan bahwa pemilihan lokasi di TMII sebagai tempat pameran sangatlah tepat, karena di sini banyak anjungan-anjungan daerah yang mencerminkan budaya dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Menteri Sekretariat Negara (Sesmensesneg), Setya Utama. “Hari ini saya juga melihat, pemilihan tempatnya juga tepat, di mana orang berwisata, berekreasi di sini (TMII), sambil berwisata melihat pameran arsip”, tambahnya.

Sementara itu, Plt. Kepala ANRI, M. Taufik melalui tema pameran ini, mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga persatuan dan keberagaman Indonesia. “Mari bersama-sama kita junjung tinggi keberagaman ini”, terangnya. M. Taufik menambahkan pameran arsip nusantara dapat menjadi sarana wisata edukasi



Kerja bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Balai Panjang, Museum Indonesia, TMII, 24 s.d 31 Agustus 2019.

mengenai sejarah perjalanan bangsa ini. “Ini (pameran) dapat menjadi suatu sarana edukasi dan destinasi”, ungkapnya.

Pameran Arsip Nusantara : “Merajut Keberagaman Menuju Indonesia Maju” dapat mengungkapkan dengan baik mengenai keberagaman kebudayaan Indonesia dari Kota Sabang hingga Kabupaten Merauke dan dari Pulau Rote hingga Pulau Miangas yang terdiri suku, agama, budaya dan adat istiadat. Konteks ini sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang tertulis dalam lambang burung Garuda “Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia adalah sebuah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang belum dimiliki oleh semua bangsa di dunia. Pemerintah harus dapat mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik.

Arsip yang dipamerkan kali ini, bukan hanya berupa arsip kertas saja, melainkan arsip foto, maupun arsip film juga ditampilkan dalam pameran ini. Hal ini tentunya sangat baik untuk para pengunjung, sehingga pameran ini terkesan tidak monoton tetapi penuh dengan kreasi. Dengan melihat arsip tersebut, maka para pengunjung akan mudah untuk meresapi mengenai keberagaman budaya Indonesia yang dapat ditampilkan melalui arsip yang tersimpan di ANRI.

Gambaran peristiwa yang terekam dalam arsip tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran dan contoh yang

baik bagi masyarakat yang ingin tahu lebih banyak mengenai keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Khazanah arsip mengenai kekayaan dan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia dan hal ini patut menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan menunjukkan luhurnya budaya para pendahulu kita. Selain itu, dengan adanya pameran arsip ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian bagi dosen, guru, mahasiswa, pelajar maupun masyarakat umum.

Hal ini sesuai dengan program nawacita Presiden Jokowi khususnya mengenai revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Dalam pameran ini ditampilkan pula beberapa kegiatan Presiden RI mulai dari Presiden Sukarno hingga Joko Widodo yang tentunya terkait dengan budaya Indonesia. Selain itu, turut dipamerkan pula pengakuan dunia terhadap hasil karya anak bangsa berupa keris, batik, angklung serta hasil karya lainnya berupa tarian, irigasi subak, dan tulisan serta peristiwa lainnya seperti Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok. (is)

BANGUN SINERGI KEARSIPAN BUMN, ANRI GELAR RAKORNAS KEARSIPAN BUMN



FOTO: DOK. ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Direktorat Kearsipan Pusat selenggarakan acara Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Kearsipan BUMN Tahun 2019. Acara Rakor berlangsung sejak 27-28 Agustus 2019 di Grand Kemang, Jakarta.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Direktorat Kearsipan Pusat selenggarakan acara Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Kearsipan BUMN Tahun 2019. Acara Rakor berlangsung sejak 27-28 Agustus 2019 di Grand Kemang, Jakarta.

Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan BUMN Tahun 2019 ini merupakan upaya bersama untuk membangun sinergitas dalam penyelenggaraan kearsipan BUMN di Indonesia. Melalui rakor ini

akan diketahui kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu dikeluarkan oleh otoritas (ANRI, Kementerian BUMN, Pimpinan BUMN) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan BUMN dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa pada pemerintahan saat ini dan pemerintahan berikutnya, bidang kearsipan memiliki peranan yang strategis dalam mewujudkan Program Nawacita Pemerintahan Presiden Jokowi”, tutur Plt. Kepala ANRI, M. Taufik. Lebih lanjut M. Taufik menambahkan bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) point langsung yang terkait erat dengan kearsi-

pan yaitu pertama, Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Kedua, Melakukan revolusi karakter bangsa. Dalam rangka mewujudkan kedua agenda ini ANRI telah menetapkan Visi 2015-2019 yaitu Arsip sebagai Pilar Good Governance dan Integrasi Memori Kolektif Bangsa.

“Kami berharap kepada BUMN di seluruh Indonesia untuk dapat mensinergikan dengan program kearsipan di BUMN dengan program nasional”, ungkap Plt. Kepala ANRI, M. Taufik.

Pada kesempatan ini, M. Taufik juga menyampaikan kembali bahwa dalam rangka menjamin BUMN (holding dan anak perusahaan) dapat menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan, maka dalam rangka pembinaan kearsipan nasional perlu dilaksanakan program/kegiatan pencahangan gerakan sadar tertib arsip dan pengawasan kearsipan di lingkungan BUMN.

Terkait dengan hal ini ANRI telah menerbitkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), dan Peraturan Kepala ANRI No. 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Dalam kedua Perka ANRI

tersebut terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu setiap pencipta arsip (termasuk BUMN) untuk menyelenggarakan kearsipan di lingkungan kerja masing-masing sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini BUMN harus memperhatikan beberapa aspek kearsipan, yaitu ketersediaan kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip, sumber daya kearsipan (SDM, prasarana dan sarana, kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya lainnya).

“Selanjutnya saya ingin menyampaikan juga terkait kebijakan pengawasan kearsipan eksternal oleh ANRI sebagaimana telah dilakukan terhadap kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah pada 2016-2019 akan juga dilakukan terhadap BUMN pada 2020”, terang M. Taufik. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI No. 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan bahwa pengawasan kearsipan eksternal oleh ANRI terhadap pencipta arsip (K/L, pemda, BUMN, dan perguruan tinggi negeri) tidak lagi hanya pada aspek kebijakan penyelenggaraan kearsipan saja, tetapi juga pada aspek implementasi kebijakan kearsipan dalam kaitannya arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan alat bukti sah dalam penggunaan anggaran negara.

Sementara itu, Direktur Kearsipan Pusat, Azmi, berharap, melalui Rakornas Kearsipan BUMN Tahun 2019 ini, dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat berdampak pada penyelenggaraan kearsipan BUMN yang lebih baik. Azmi juga berharap, penyelenggaraan kearsipan dapat menjadi Key Performance Indikator (KPI) di lingkungan BUMN. Menurut Azmi, apabila penyelenggaraan kearsipannya buruk, maka tata kelola manajemen organisasinya pun juga buruk. (is)

KOMERSIALISASI ARSIP AUDIO VISUAL DAN MENJAGA PERADABAN BANGSA



FOTO: ISTIMEWA

Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menyelenggarakan Workshop Digitasi dan Monetisasi Arsip Audiovisual dari tanggal 25-28 September 2019 bertempat Hotel Alila Surakarta, Jawa Tengah.

Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menyelenggarakan Workshop Digitasi dan Monetisasi Arsip Audiovisual dari tanggal 25-28 September 2019 bertempat Hotel Alila Surakarta, Jawa Tengah.

Workshop ini bertujuan untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif terutama arsip audio visual yang merupakan kekayaan intelektual Bangsa Indonesia yang selama ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal menjadi bernilai komersial tinggi.

Workshop yang diikuti oleh para pelaku ekonomi kreatif dari seluruh Indonesia, dibuka oleh Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ricky Joseph Pesik, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BEKRAF dengan Perum Percetakan Negara RI dan Institute National de l'audiovisual (INA) Perancis.

Workshop diawali dengan Business Talk yang menghadirkan pembicara dari ANRI, INA, Dirjen Kebudayaan, BE KRAF, dan 13 Entertainment.

Dalam Business Talk tersebut Direktur Preservasi ANRI, Kandar

mempresentasikan Pengelolaan Arsip Statis Audiovisual. Kandar mengatakan bahwa Arsip Audiovisual di ANRI sangat banyak jumlahnya yang meliputi foto 3.460.868 lembar, film 59.002 reel, microfilm 14.463 roll, microfische 14.262 fische, sound recording 45.445 kaset, video 25.347 kaset, piringan hitam 101 piece, dan optical disc 16.152 keping.

Selama ini ANRI sudah mengelola arsipnya dengan benar mulai dari penyimpanan dan pemeliharaan, restorasi bagi arsip yang rusak, dan digitalisasi untuk kepentingan pelestarian dan akses.

Namun demikian tantangan bagi ANRI dalam pengelolaan arsip audio-

visual tersebut antara lain pertama; Indonesia merupakan negara tropis yang bersuhu 18° s.d 38° C dan kelembaban 90 %, padahal suhu yang diperlukan untuk kelestarian arsip tersebut di bawah 18° C dan kelembaban maksimal 55 %. Kedua; obsolete format (betacam, betamex, umetic, dan film) dan ketiga; missing player dalam digitalisasi.

Volume arsip di ANRI yang sangat banyak tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh para pelaku ekonomi kreatif, sehingga workshop ini sangat baik bagaimana mengoptimalkan keberadaan arsip tersebut untuk kepentingan bisnis.

Di samping arsip tersebut mempunyai manfaat untuk riset, pendidikan, hiburan, dan menjaga peradaban bangsa. Kandar mempersilakan para pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan arsip di ANRI untuk kepentingan yang lebih luas termasuk bisnis, namun jangan lupa peradaban bangsa Indonesia harus tetap terjaga karena informasi di dalam arsip tersebut merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia.(kdr)*(Inh)



FOTO: ISTIMEWA

ANRI MELAKSANAKAN TRAINING ON RECORDS AND ARCHIVES MANAGEMENT FOR PALESTINE: ARCHIVAL RECOVERY PLAN



FOTO: DOK. ANRI

Sekretaris Utama ANRI, Sumrahyadi membuka acara Program Training on Records and Archives Management For Palestine: Archival Recovery Plan Posts Disaster.

Sekretaris Utama ANRI, Sumrahyadi membuka acara Program Training on Records and Archives Management For Palestine: Archival Recovery Plan Posts Disaster.

Acara pembukaan dihadiri oleh Counselor of the Palestine Embassy, Dr. Zuhair S.M Alshun (Taher Hamad) dan Kepala Biro Perencanaan dan Humas M. Imam Mulyantono serta Kepala Pusdiklat Kearsipan ANRI Listayingtyas M.

Dalam sambutannya Sumrahyadi menyampaikan bahwa bencana akan menyebabkan kerugian besar. Tidak hanya untuk material yang hilang tetapi juga inmaterial. Sedangkan untuk lembaga pemerintah, bencana akan sangat mempengaruhi kelangsungan organisasi, karena arsip yang merupakan sumber informasi pemerintah,

telah menjadi bagian pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut Sumrahyadi mengatakan bahwa Arsip adalah sumber layanan informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk rencana recovery arsip setelah bencana adalah suatu keharusan. Ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan untuk publik dan masyarakat.

Sekretaris Utama ANRI menyampaikan tujuan dilaksanakan program Training on Records and Archives Management For Palestine adalah Pertama; pelatihan ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan tentang Manajemen arsip terutama pasca bencana dan rencana pemulihan arsip. Kedua; Pelatihan ini untuk menunjukkan simpati dan dukungan Indonesia bagi kebebasan Palestina, dan terakhir, ada harapan membangun kesada-

ran bahwa catatan dan arsip adalah tulang punggung administrasi negara, sehingga dibutuhkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola arsip.

Pelatihan ini adalah salah satu program prioritas nasional ANRI dan sebagai bagian dari South-South cooperation Program Asia dan Afrika. Program ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan praktik manajemen arsip. Program ini telah dilakukan sejak 2009 hingga 2019 dan menjadi perhatian Indonesia untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Training Course di laksanakan di Hotel Santika Bogor pada tanggal 8 sampai dengan 12 Oktober 2019 dan diikuti oleh 28 peserta dari Palestina.

(Inh)

INDONESIA-SINGAPURA SEPAKATI KERJA SAMA KEARSIPAN

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong saat pertemuan *Leaders Retreat* Indonesia - Singapura di *The Istana*, Singapura, pada Selasa, 8 Oktober 2019 menyaksikan secara langsung penandatanganan kerja sama kearsipan.

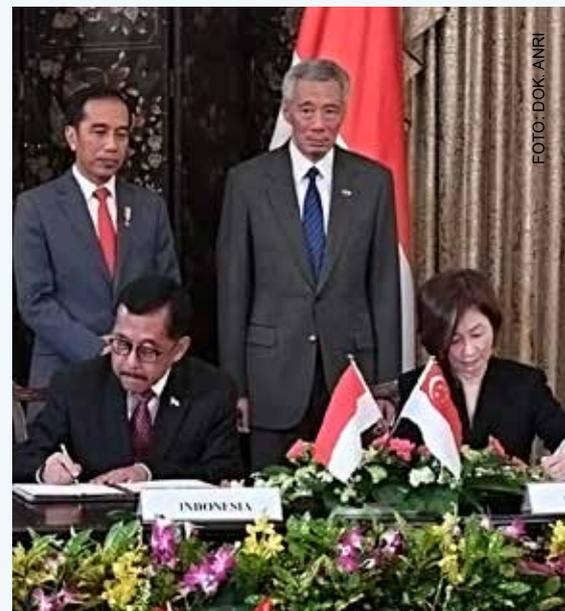
Nota kesepahaman kerja sama kearsipan dengan durasi tiga tahun ke depan, akan mengolaborasi Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Arsip Nasional Singapura.

Perjanjian itu memungkinkan kedua lembaga untuk berbagi pengetahuan arsip mengenai sejarah dan budaya, pertukaran profesional di bidang kearsipan, pameran bersama dan penelitian serta publikasi arsip.

Semoga penandatanganan kerjasama ini dapat membawa manfaat dan kemajuan bagi kedua negara. (IT)



Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong saat pertemuan *Leaders Retreat* Indonesia - Singapura di *The Istana*, Singapura, Selasa (8/10).



ANRI JAJAKI PEMBANGUNAN DEPOT ARSIP DI PROVINSI JAWA BARAT



FOTO: DOK. ANRI

Plt. Kepala ANRI M.Taufik beserta Jajaran di terima langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (9/10)

aktif dan jati diri bangsa.

Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat mengapresiasi dan menyambut baik rencana pembangunan Depot Arsip bernilai guna kelanjutan di Provinsi Jawa Barat, yang nantinya akan menyimpan arsip-arsip statis instansi vertikal yang ada di Jawa Barat.

Terkait hal ini Pemerintah Jawa Barat siap mendukung dan mempersiapkan lahan yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana dimaksud.

Maju Arsipnya, Jaya Bangsa. **(IT)**

Dalam rangka melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan terutama tentang penyelamatan arsip bernilai guna pertanggung jawaban nasional, ANRI berencana membangun Depot Arsip Bernilai Guna Kelanjutan di tiap Provinsi se-Indonesia.

ANRI melakukan peninjauan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penyiapan lahan depot arsip di wilayah Jawa Barat. Dalam kesempatan ini Plt. Kepala ANRI M.Taufik beserta Jajaran di terima langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (9/10)

Pada kesempatan tersebut telah diperoleh kesepahaman dan visi yang sama terkait pentingnya pembangunan depot arsip statis sebagai salah satu upaya melestarikan memori kole-



FOTO: DOK. ANRI



FOTO: DOK. ANRI

WUJUDKAN TATA KELOLA ARSIP PERGURUAN TINGGI LEBIH BAIK, KEMENRISTEKDIKTI CANANGKAN GNSTA



Pencanangan GNSTA dilaksanakan di Kantor Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta, Senin, (14/10)

Jakarta (14/10) - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) canangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Acara pencanangan GNSTA dilaksanakan di Kantor Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. Acara pencanangan dihadiri oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Ristekdikti. Hal ini menggambarkan keseriusan instansi dalam mengelola kearsipan sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. “Seperti kita ketahui bahwa GNSTA ini telah secara resmi dicanangkan pada tanggal 17 Agustus 2016 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini membuat kami optimis bahwa kearsipan di lingkungan Kementerian Ristekdikti akan semakin tertib, semakin baik dan semakin maju karena kesadaran seluruh pejabat dan pegawainya semakin meningkat”, terang Pelaksana Tugas Kepala ANRI, M. Taufik.

Lebih lanjut M. Taufik sampaikan

bahwa pencanangan GNSTA ini baru merupakan langkah awal bersama untuk memulai suatu gerakan yang terpadu dan berkesinambungan. Langkah berikutnya yang lebih kongkrit dalam kegiatan kearsipan harus segera diwujudkan diantaranya tertib dalam kebijakan, tertib organisasi, tertib SDM, tertib prasarana dan sarana, tertib pengelolaan arsip, dan tertib pendanaan kearsipan. Kami selaku lembaga Pembina kearsipan nasional sangat memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Risetdikti di bidang Kearsipan.

Sementara itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Prof. H. Mohamad Nasir, Drs., Ak., M.Si., Ph.D, mengajak kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi untuk mengelola arsipnya dengan baik. Hal ini akan sangat bermanfaat dalam mendukung tata kelola perguruan tinggi yang lebih baik. “Mudah-mudahan dengan kita melakukan kasadaran tertib arsip ini, kita akan lebih governance, lebih transparan, lebih fairness, bahkan kalau kita di dalam audit itu traceability nya akan lebih baik, penelusurannya akan lebih mudah”, ungkap Mohamad Nasir. (is)



KOMITMEN TERHADAP PENGELOLAAN ARSIP, KEJAKSAAN AGUNG RI CANANGKAN GNSTA



FOTO: DOK. ANRI

Kejaksaan Agung RI canangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Acara pencanangan GNSTA dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin. (14/10)

Jakarta (14/10) - Kejaksaan Agung RI canangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Acara pencanangan GNSTA dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. Acara pencanangan dihadiri oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kejaksaan Agung RI. Hal ini menggambarkan keseriusan instansi dalam mengelola kearsipan sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. “Seperti kita ketahui bahwa GNSTA ini telah secara resmi dicanangkan pada tanggal 17 Agustus 2016 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi”, tutur Pelaksana Tugas Kepala ANRI, M. Taufik.

Lebih lanjut M. Taufik menyampai-

kan bahwa Pencanangan GNSTA ini baru merupakan langkah awal untuk memulai suatu gerakan yang terpadu dan berkesinambungan. Langkah berikutnya yang lebih kongkrit dalam kegiatan kearsipan harus segera diwujudkan diantaranya tertib dalam kebijakan, tertib organisasi, tertib SDM, tertib prasarana dan sarana, tertib pengelolaan arsip, dan tertib pendanaan kearsipan. “Kami selaku lembaga pembina kearsipan nasional sangat memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI di Bidang Kearsipan”, tambahannya.

Sementara itu, Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengajak kepada seluruh jajarannya untuk melaksanakan tertib pengelolaan arsip dengan baik. “Saya

mengajak kepada seluruh jajaran Kejaksaan, segenap satuan kerja di manapun berada untuk secara serentak melakukan hal yang sama memelihara dan melaksanakan pengelolaan arsip dengan baik, tertib, teliti, lengkap, utuh, dan cermat secara berkelanjutan sesuai tata cara kebijakan kearsipan yang berlaku”, tuturnya dalam sambutan.

Pada kesempatan ini, M. Taufik sangat mengapresiasi atas dibangunnya Record Center/Pusat Penyimpanan Arsip Inaktif Kejaksaan Agung RI. “Semuanya telah terjawab, bahwa kita patut berbangga karena Kejaksaan Agung akan meresmikan Adhyaksa Record Center/Pusat Penyimpanan Arsip Inaktif Kejaksaan Agung RI. Hal ini sebagai bukti adanya komitmen yang sangat tinggi akan pentingnya penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kejaksaan Agung RI”, terangnya.

Pada acara ini, dilaksanakan pula penyerahan arsip statis Kejaksaan Agung RI. Arsip statis Kejaksaan Agung RI yang diserahkan ke ANRI berupa investigasi kriminal, peristiwa politik di berbagai daerah, Ikhtisar Politik Ekonomi, dan Laporan Politik Daerah Tahun 1902 – 1953 sebanyak 97 nomor (30 bok). Selain itu, dilaksanakan pula penandatanganan nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung RI dengan ANRI. (is)

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL RI MENYERAHKAN ARSIP KEPADA ANRI



FOTO: DOK. ANRI

Plt. Kepala ANRI Muhamad Taufik didampingi oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan ANRI, menghadiri penyerahan arsip statis terjaga Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia yang di serahkan secara langsung oleh Kepala Badan Informasi Geospasial Hassanudin Zainal Abidin, yang di saksikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala BAPPENAS Bambang Brojonegoro, penyerahan arsip terjaga terdiri dari tersebut bertepatan dengan peringatan 50 tahun hari informasi geospasial yang berlangsung di Cibinong Jawa Barat.

Plt. Kepala ANRI Muhamad Taufik didampingi oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan ANRI, menghadiri penyerahan arsip statis terjaga Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia yang di serahkan secara langsung oleh Kepala Badan Informasi Geospasial Hassanudin Zainal Abidin, yang di saksikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala BAPPENAS Bambang Brojonegoro, penyerahan arsip terjaga terdiri dari tersebut bertepatan dengan peringatan 50 tahun hari informasi geospasial yang berlangsung di Cibinong

Jawa Barat.

Dalam sambutannya yang di sampaikan Plt Kepala ANRI mengapresiasi keseriusan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia (BIG RI), dalam menangani kearsipan yang terkelola dengan baik dan semakin maju karena kesadaran seluruh pejabat dan pegawainya semakin meningkat.

Penyerahan arsip statis yang sangat berharga karena mewariskan jejak sejarah bangsa Indonesia, arsip statis yang di serahkan ke ANRI terdiri dari Peta NKRI, Foto Wilayah

DKI, Peta Lingkungan Laut Nasional, Peta Lingkungan Pantai Nasional, dan Perundingan Perbatasan Indonesia-Malaysia sebanyak 61 jilid, 2 lembar Plano, dan 408 lembar foto positif.

Arsip tersebut merupakan memori yang sangat berharga penting bagi kita dan generasi mendatang karena menggambarkan sejarah bangsa, dengan diserahkannya arsip statis BIG RI kepada ANRI berarti kita telah mewariskan informasi yang sangat berharga, yakni arsip tentang informasi Geospasial di Indonesia. (md)

ANRI & PERPUSNAS RI SINERGI DALAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN LITERASI

Jakarta - 11/11/19, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Muhammad Syarif Bando, melaksanakan kunjungan kerja ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Senin, 11 November 2019. Kunjungan Kerja tersebut diterima langsung oleh Plt. Kepala ANRI, M. Taufik beserta jajaran di Kantor ANRI, Ampera Raya, Jakarta Selatan. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk membangun sinergi dan keselarasan dalam penyelenggaraan kearsipan dan literasi.

ANRI dan PNRI memiliki peranan yang strategis dalam membangun peradaban melalui sinergi kedua instansi tersebut.

“Kedepan, kita akan menjadi sebuah pesawat yang harus berfungsi bersama, terus terbang bersama untuk membangun peradaban Indonesia di masa yang akan datang”, tutur Syarif Bando.

Sementara itu, Plt. Kepala ANRI, M. Taufik menambahkan pentingnya sinergi guna mencapai cita-cita Indonesia maju.

“Dengan tema ini (Sinergi) kita akan selalu bersinergi, berelaborasi kedua substansi kita dan implementasi kita berkolaborasi sehingga akan mencapai Indonesia maju sesuai harapan Presiden”, tambahnya.

Kunjungan Syarif Bando ke ANRI juga berkaitan erat dengan kegiatan Serah Terima Arsip Statis bersamaan dengan Serah Terima Hasil Pengawasan Kearsipan, dan Serah Terima Pekerjaan Jasa Kearsipan.



Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Muhammad Syarif Bando, melaksanakan kunjungan kerja ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Senin. (11/11)

3 (tiga) rangkaian acara tersebut dilakukan secara bersamaan agar totalitas pengelolaan kearsipan di lingkungan PNRI terwujud dan terjadi percepatan perubahan penyelenggaraan kearsipan ke arah yang lebih baik. Percepatan ini sengaja dilakukan agar PNRI yang serumpun dengan ANRI dapat segera bangkit pengelolaan kearsipannya dalam kondisi atau tingkat yang ideal.

“Percepatan ini akan menjadi model kepada binaan kita, terutama di kearsipan bagaimana akselerasi pertumbuhan kearsipan, harus ditumbuhkembangkan”, terang M. Taufik.

Sedangkan khusus untuk Serah Terima Arsip Statis PNRI, hal ini sebagai bentuk kepedulian bersama dalam upaya ikut berperan serta me-

lestarikan dan memanfaatkan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa. Serah terima arsip statis ini merupakan momentum yang sangat berharga karena mewariskan jejak sejarah bangsa Indonesia.

Arsip statis PNRI yang diserahkan ke ANRI terdiri dari Peraturan Kepala PNRI, LAKIP, dan MoU dan lasin-lain sebanyak 51 nomor (7 boks/0,7 Meter Linier). Arsip tersebut merupakan memori yang sangat penting bagi masyarakat saat ini dan generasi mendatang karena menggambarkan sejarah bangsa. Dengan diberikannya arsip statis, PNRI telah mewariskan informasi yang sangat berharga untuk proses pembelajaran di masa mendatang. (is)

INVENTARIS ARSIP DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 1950 – 1998, SIAP DILAYANKAN KE PUBLIK



FOTO: DOK. ANRI

Direktorat Pengolahan Arsip ANRI melangsungkan Ekspose Inventaris Arsip Departemen Agama RI Tahun 1950-1998. Acara tersebut dihadiri oleh dua narasumber, yaitu Mohamad Miftah, S.HI (Kepala Subbagian Pengolahan Data Kepegawaian pada Bagian Data, Informasi dan Naskah Kepegawaian Kementerian Agama RI) dan Sarip Hidayat, S.Kom, M.Si (Direktur Pengolahan Arsip ANRI). (03/19)

Jakarta (03/19) - Direktorat Pengolahan Arsip ANRI melangsungkan Ekspose Inventaris Arsip Departemen Agama RI Tahun 1950-1998. Acara tersebut dihadiri oleh dua narasumber, yaitu Mohamad Miftah, S.HI (Kepala Subbagian Pengolahan Data Kepegawaian pada Bagian Data, Informasi dan Naskah Kepegawaian Kementerian Agama RI) dan Sarip Hidayat, S.Kom, M.Si (Direktur Pengolahan Arsip ANRI).

Acara diawali dengan laporan kegiatan yang disampaikan oleh Dra. Retno Wulandari, M. Hum selaku Kepala Subdirektorat Pengolahan Arsip I. Retno Wulandari menyampaikan bahwa Kementerian Agama RI telah melakukan penyerahan arsip ke ANRI sebanyak lima kali. Arsip yang telah diserahkan ini kemudian diolah dan ditata dalam 266 boks arsip yang terdiri dari arsip tekstual,

foto, dan rekaman suara. Acara kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Dr. M. Taufik, M.Si selaku Deputi Bidang Konservasi Arsip. M. Taufik menjelaskan pentingnya peran arsip sebagai jati diri dan identitas lembaga serta sebagai memori kolektif Bangsa Indonesia. Beliau juga menyatakan pentingnya arsip sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Memasuki acara inti, yaitu pembahasan materi yang dimoderatori oleh Retno Wulandari. Pembicara pertama, Mohamad Miftah memaparkan sejarah Kementerian Agama RI dari masa ke masa, khususnya periode 1950-1998. Mohamad Miftah menerangkan bahwa Kementerian Agama RI pernah menjadi acuan bagi kementerian lainnya di bidang kearsipan. Pembicara kedua, Sarip Hidayat memberikan penjelasan mengenai kebijakan ANRI dalam pengolahan arsip statis Departemen

Agama RI tahun 1950-1998. Sarip Hidayat menerangkan bahwa kebijakan yang diterapkan ANRI dalam pengolahan arsip Departemen Agama RI ini, mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dengan kearsipan, yaitu Perka ANRI No. 27 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis, PERANRI No.14 tahun 2018 tentang Standar Deskripsi Arsip Statis, serta Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) Direktorat Pengolahan tahun 2015.

Dengan penyelenggaraan Ekspose Inventaris Arsip Departemen Agama RI 1950-1988, diharapkan dapat mengisi kekosongan informasi mengenai peran Kementerian Agama di Republik Indonesia. **(MTHP)**

PERINGATI 15 TAHUN TSUNAMI SAMUDERA HINDIA (NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS), ANRI GELAR SEMINAR INTERNASIONAL DAN RESMIKAN DEPOT ARSIP STATIS

Banda Aceh, (05/12) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Pemerintah Aceh dan Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) menyelenggarakan Seminar Internasional dengan tema Refleksi Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai Memory of the World pada Kamis, 5 Desember 2019 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. Seminar ini dilaksanakan dalam rangka peringatan peristiwa Tsunami Samudera Hindia yang terjadi 15 tahun lalu.

Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala ANRI, Dr. M. Taufik dan dihadiri oleh pimpinan tinggi berbagai insitutus Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) yang dalam hal ini Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum, Tin Zuraida, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Syarif Bando, pimpinan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Serta Ketua Komite Memory of the World Indonesia, Dr. Mego Pinandito.

Seminar internasional ini menghadirkan berbagai pembicara dari dalam dan luar negeri yang diawali oleh Keynote Speech dari Rektor UNSYIAH, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. Seminar ini bertujuan untuk mengingatkan (merefleksikan) kembali diakuinya Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai memori warisan dunia melalui registrasi di International MoW Register UNESCO pada tahun 2017. Pengakuan ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan dokumenter untuk kepentingan masyarakat dunia. Selain itu, seminar ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran arsip tsunami Samudera Hindia sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat dunia dan pengambilan kebijakan pemerintah di bidang penanggulangan bencana.

Pada kesempatan ini dilaksanakan pula penandatanganan naskah kerja sama antara ANRI dengan Badan



FOTO: DOK. ANRI

ANRI bekerja sama dengan Pemerintah Aceh dan UNSYIAH menyelenggarakan Seminar Internasional dengan tema Refleksi Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai *Memory of the World* di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. (05/12)

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang Penanggulangan Bencana dan Kearsipan. Selain itu ANRI juga melakukan penandatanganan naskah kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) khususnya terkait dengan riset kebencanaan dan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Kedua kerja sama dimaksud memiliki kesamaan ruang lingkup yaitu pembentukan pusat studi arsip kebencanaan.

Sejak dicantumkannya Arsip Tsunami Samudera Hindia dalam International Memory of the World Register, ANRI senantiasa melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelestarian terhadap arsip tersebut yang salah satunya diwujudkan melalui pembangunan Depot Arsip Statis Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST) di Bakoy, Ingin Jaya Aceh Besar yang diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo. Pembangunan gedung ini merupakan upaya konkret dalam meningkatkan kualitas preservasi Arsip Tsunami Samudera Hindia agar kelestariannya dapat terjaga bagi generasi yang akan datang. Selain itu, fasilitas ini diproyeksikan akan menjadi infrastruktur penting dalam pembentukan Pusat Studi Arsip Kebencanaan.

Arsip Tsunami Samudera Hindia telah diakui oleh UNESCO melalui program Memory of the World pada 30 Oktober 2017. Arsip tersebut merupakan rekaman tentang peristiwa bencana tsunami, proses mitigasi, serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana. Arsip Tsunami Samudera Hindia terdiri dari arsip tekstual sepanjang 9,3 KM Linier, arsip foto sebanyak 500 lembar, arsip rekaman suara sebanyak 196 kaset, arsip video magnetic sebanyak 13 kaset, serta arsip elektronik dalam bentuk CD/DVD sebanyak 1.230 keping. Pernominasian Arsip Tsunami Samudera Hindia dilakukan melalui nominasi bersama (atau Joint Nomination) yang dilakukan oleh Indonesia dan Sri Lanka.

Arsip Tsunami Samudera Hindia merekam peristiwa tsunami maha dahsyat yang terjadi pada 26 Desember 2004 dengan ketinggian gelombang mencapai 30 meter serta menimbulkan kerusakan di berbagai negara seperti Indonesia, Sri Lanka, India, Malaysia, Myanmar, Bangladesh, Thailand dan 12 negara lainnya serta menelan korban mencapai kurang lebih 310.000 jiwa. Peristiwa ini juga menjadi salah satu tonggak sejarah kebencanaan dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, Arsip Tsunami Samudera Hindia juga menggambarkan Solidaritas Antar Bangsa dari berbagai penjuru dunia yang saling bahu membahu dalam memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang terdampak bencana.

Selain itu, Arsip Tsunami Samudera Hindia juga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi generasi saat ini dan di masa yang akan datang khususnya terkait dengan bidang kebencanaan. Melalui arsip tersebut, diharapkan pula dapat dihasilkan berbagai kebijakan strategis khususnya dalam bidang penanggulangan bencana. (is)

WUJUDKAN SMART BUILDING REPOSITORY, ANRI RESMIKAN GEDUNG DEPOT ARSIP BALAI ARSIP STATIS & TSUNAMI ACEH



FOTO: DOK. ANRI

Arsip Nasional RI (ANRI) meresmikan Smart Building Repository Gedung Depot Arsip Balai Arsip Statis & Tsunami Aceh (BATA) yang berlokasi di Desa Bakoi, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. (05/12)

Banda Aceh - 05/12/19, Arsip Nasional RI (ANRI) meresmikan Smart Building Repository Gedung Depot Arsip Balai Arsip Statis & Tsunami Aceh (BATA) yang berlokasi di Desa Bakoi, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Proses peresmian dilaksanakan melalui pemotongan pita oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala ANRI, M. Taufik, dan Staf Ahli Bidang Hukum

Menteri PAN & RB, Tin Zuraida. Sebelum pemotongan pita, kegiatan peresmian dimulai oleh pembacaan laporan kegiatan oleh Kepala (BATA), Saptono Edi Purwanto. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian sambutan - sambutan oleh tamu undangan seperti Wakil Bupati Aceh Besar yang diwakili oleh Asisten Daerah III, Staf Ahli Menteri PUPR, Komisioner KASN

(Kepala ANRI Periode 2014-2019), Kepala Perpustakaan Nasional RI, dan ditutup oleh sambutan Plt. Kepala ANRI.

Pembangunan Gedung Depot Arsip yang menerapkan konsep smart building diharapkan dapat menjadi tempat penyimpanan yang aman dalam mengelola arsip yang berisi informasi mengenai peristiwa dan penanganan Bencana Tsunami Aceh tahun 2004. Arsip yang tersimpan pada gedung ini akan dimanfaatkan sebagai bahan studi mengenai penanganan bencana alam, khususnya bencana tsunami. Fasilitas publik yang tersedia dalam gedung ini antara lain Ruang Layanan Informasi Arsip, Ruang Teater, dan Ruang Pameran.

Tamu undangan lainnya yang turut menyaksikan prosesi peresmian antara lain Rektor Universitas Syiah Kuala, Asisten III Pemerintah Aceh, Kepala Biro Hukum & Kerjasama BNPB, Perwakilan SKPD di lingkungan Pemerintah Aceh, dan masyarakat sekitar. **(AM)**



FOTO: DOK. ANRI

ARSIP GERAKAN NON-BLOK DAN ARSIP PIDATO SOEKARNO SEBAGAI WARISAN BUDAYA DUNIA



FOTO: DOK. ANRI

Arsip Nasional RI mengadakan serangkaian FGD dengan delegasi beberapa negara yaitu; Serbia, India, Algeria dan Saudi Arabia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat kerjasama antar negara yang sudah terbangun sejak masa awal terbentuknya Republik Indonesia, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang kearsipan.

Jakarta, (09/12/19) - Arsip Nasional RI mengadakan serangkaian FGD dengan delegasi beberapa negara yaitu; Serbia, India, Algeria dan Saudi Arabia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat kerjasama antar negara yang sudah terbangun sejak masa awal terbentuknya Republik Indonesia, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang kearsipan. Acara tersebut diadakan di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan.

Plt. Kepala Arsip Nasional RI, M. Taufik membuka acara sekaligus diskusi mengenai Rancangan Usulan Arsip Gerakan Non-Blok (Non-Alignment Movement Archives) '1961, sebagai Warisan Budaya Dunia (The Memory of the World) oleh UNESCO. Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika '1960, di Bandung menjadi cikal bakal terbentuknya Gerakan Non-Blok, yang pada akhirnya gerakan tersebut memberikan pengaruh besar dalam perkembangan politik dunia. Gerakan Non-Blok yang mengedepankan sikap; Perdamaian, Kemerdekaan, Kesetaraan, Pengembangan Hukum

dan Keadilan, dan Anti-Kolonialisme terbukti dapat menjadi kekuatan baru antara Blok Barat dan Blok Timur, sehingga membawa kemerdekaan bagi para anggotanya.

Chairman of Indonesia MoW National Committee, Mego Pinandito membuka sesi diskusi kedua mengenai strategi dalam pengajuan Arsip sebagai Warisan Budaya Dunia. Indonesia memiliki beberapa Arsip yang maju sebagai Warisan Budaya Dunia, diantaranya; Arsip Borobudur, Arsip Tsunami, Arsip La Galigo, dan Arsip Asia-Afrika. Selanjutnya dibahas mengenai tatacara pengisian formulir dan pengajuan sebagai warisan budaya dunia, yang mana Arsip tersebut harus bisa memberikan pengaruh besar dalam perkembangan dunia dan didukung oleh bibliografi yang diterima secara international.

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Imam Gunarto dalam sesi ketiga memulai diskusi mengenai pengajuan Arsip Pidato Soekarno di sidang

umum PBB pada tahun 1960 sebagai Warisan Budaya Dunia. Pidato tersebut dianggap membawa pengaruh besar pada dunia karena membuka mata dunia akan pentingnya; Nasionalisme, Equality an human right, Anti-kolonialisme dan Anti-imperialisme, Restructuring the United Nation, World Peace dan dengan lantang Soekarno memberikan Alternative Ideologi untuk dunia disamping Liberalisme dan Komunisme, yaitu Ideologi Pancasila. Gesture dan gaya bahasa Soekarno terbukti menyita perhatian dunia, dibuktikan setelah pidato tersebut ada beberapa undangan kepada Soekarno untuk kembali membahas mengenai Perdamaian Dunia, Anti Kolonialisme dan Anti Imperialisme.

Dalam acara tersebut turut hadir, Plt. Kepala Arsip Nasional RI, Kepala Arsip Nasional Serbia, Excecutive Chairman of Indonesian National Committee for UNESCO, Delegasi India, Delegasi Algeria, Delegasi Saudi Arabia, Perwakilan Kementerian dan Lembaga, Arsiparis dan Staf Setiap Negara. (ws)

► Terima Kasih ◀

Atas Kerjasama Semua Pihak

Arsip Nasional RI

Kembali Dinobatkan Sebagai
Badan Publik

“Informatif”

oleh Komisi Informasi Pusat RI



UNDUH MAJALAH **ARSIP** DALAM FORMAT DIGITAL



Cara unduh majalah ARSIP dalam format digital:

1. Masuk ke *website* www.anri.go.id
2. Klik menu “Publikasi”
3. Kemudian pilih “Majalah ARSIP”
4. Unduh *file* “Majalah ARSIP”
5. Majalah ARSIP tersedia dalam *Portable Document Format* (PDF) dan dapat dibaca menggunakan *software* Adobe Acrobat